



PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN

Laporan Evaluasi Tahun Kedua RPK Tahun 2023-2026



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Pertama tama marilah kita panjatkan Puji dan syukur ke hadirat ALLAH SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga dapat menyelesaikan “**LAPORAN EVALUASI HASIL PELAKSANAAN TAHUN KEDUA RENCANA PEMBANGUNAN KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2023-2026**”. Shalawat beriring salam kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah menyampaikan risalah ALLAH SWT sehingga mengantarkan kita ke gerbang ilmu pengetahuan.

Hasil evaluasi pelaksanaan RPK Bireuen Tahun 2024 secara garis besar menggambarkan beberapa hal, seperti perkembangan beberapa indikator makro pembangunan yang telah ditentukan sebelumnya, implementasi pelaksanaan program/kegiatan. Disamping itu, berdasarkan permasalahan yang timbul, juga direkomendasi beberapa hal yang perlu untuk ditindaklanjuti.

Laporan ini juga memberikan gambaran tentang perbandingan antara dokumen Rencana Pembangunan Kabupaten Bireuen (RPK) dengan dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Bireuen (RKPK Perubahan) 2024 dan perbandingan antara RKPK Perubahan 2024 dengan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen (APBK Perubahan) tahun 2024. Perbandingan ini meliputi jumlah program/kegiatan dan jumlah anggaran yang dituangkan dalam masing- masing dokumen. Secara format laporan ini telah mengadopsi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dimana sistematika pembahasannya disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada berbagai pihak yang telah ikut berkontribusi dalam kegiatan penyusunan laporan evaluasi ini.

Demikian Laporan ini disusun dengan harapan dapat memberikan gambaran terhadap pencapaian hasil dari implementasi Rencana Pembangunan Kabupaten Bireuen pada Tahun 2024.

Bireuen, 19 Mei 2025
Kepala BAPPEDA Bireuen,

Bob Mizwar, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 19780226 199612 1 001

DAFTAR ISI

Uraian	Halaman
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum.....	I-1
1.3. Maksud dan Tujuan.....	I-2
1.4. Sistematika Penulisan Hasil Evaluasi Pelaksanaan RPK 2024.....	I-2
BAB II RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAN ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN KABUPATEN BIREUEN	
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi	II-1
2.1.1 Perekonomian Kabupaten Bireuen Tahun 2024.....	II-1
2.1.1.1 Pertumbuhan PDRB	II-1
2.1.1.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi.....	II-3
2.1.1.3 PDRB Perkapita	II-4
2.1.1.4 Laju Inflasi	II-5
2.1.1.5 Indek Gini.....	II-6
2.1.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah	II-6
BAB III CAPAIAN INDIKATOR MAKRO	
3.1. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bireuen Tahun 2019-2024	III-2
3.2. IPM Kabupaten Bireuen Tahun 2018-2024.....	III-2
3.3. Angka Kemiskinan Kabupaten Bireuen Tahun 2018-2024	III-3
3.4. Pengangguran Terbuka Kabupaten Bireuen Tahun 2018-2024	III-4
3.5. PDRB per Kapita Kabupaten Bireuen Tahun 2020-2024	III-5
3.6. Ketimpangan Pendapatan Kabupaten Bireuen Tahun 2018-2024	III-6
BAB IV HASIL EVALUASI RPK BIREUEN TAHUN KEDUA TAHUN 2023-2026	
4.1 Metode Evaluasi.....	IV-1
4.2 Hasil Evaluasi Pelaksanaan IKU dan IKD RPK Tahun 2024.....	IV-1
4.2.1 Tujuan Memperkuat Pelaksanaan Syariah dalam Tatanan Kehidupan Bermasyarakat.....	IV-1
4.2.2 Tujuan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel	IV-3
4.2.3 Tujuan Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan.....	IV-5
4.2.4 Tujuan Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi.....	IV-7
4.2.5 Tujuan Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing.....	IV-11
4.2.6 Tujuan Menurunkan Kesenjangan Pendapatan dan Kemiskinan.....	IV-14
4.2.7 Tujuan Menurunkan Angka Pengangguran.....	IV-15
4.2.8 Tujuan Meningkatkan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	IV-16
4.3 Hasil Evaluasi Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Kabupaten Bireuen Tahun 2024.....	IV-17
4.4 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Indikator SPM tahun 2024	IV-26
4.4.1 Capaian SPM Untuk Bidang Pendidikan	IV-26

4.4.2	Capaian SPM Untuk Bidang Kesehatan.....	IV-28
4.4.3	Capaian SPM Untuk Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	IV-29
4.4.4	Capaian SPM Untuk Bidang Perumahan Rakyat	IV-30
4.4.5	Capaian SPM Untuk Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	IV-31
4.4.6	Capaian SPM Untuk Bidang Sosial.....	IV-32
4.5	Hasil Evaluasi Tingkat Konsistensi Antar Dokumen RPK, RKPK, dan APBK	IV-32
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	V-1
5.1.	Kesimpulan	V-1
5.2.	Rekomendasi.....	V-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Kontribusi Sektor dalam PDRB Kabupaten Bireuen Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2020-2024.....	II-2
Tabel 2.2.	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun 2024.....	II-7
Tabel 3.1.	Capaian Indikator Makro Kabupaten Bireuen Tahun 2024.....	III-1
Tabel 4.1	Kriteria Kinerja	IV-1
Tabel 4.2	Capaian Tujuan I RKPK-P TAHUN 2022 , Sasaran dan program pendukungnya.....	IV-1
Tabel 4.3	Capaian Tujuan II RKPK-P TAHUN 2022 , Sasaran dan program pendukungnya.....	IV-3
Tabel 4.4	Capaian Tujuan III RKPK-P TAHUN 2022 , Sasaran dan program pendukungnya.....	IV-5
Tabel 4.5	Capaian Tujuan IV RKPK-P TAHUN 2022 , Sasaran dan program pendukungnya.....	IV-7
Tabel 4.6	Capaian Tujuan V RKPK-P TAHUN 2022 , Sasaran dan program pendukungnya.....	IV-11
Tabel 4.7	Capaian Tujuan VI RKPK-P TAHUN 2022 , Sasaran dan program pendukungnya.....	IV-14
Tabel 4.8	Capaian Tujuan VII RKPK-P TAHUN 2022 , Sasaran dan program pendukungnya.....	IV-15
Tabel 4.9	Capaian Tujuan VIII RKPK-P TAHUN 2022 , Sasaran dan program pendukungnya	IV-16
Tabel 4.10	Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaran Urusan	IV-17
Tabel 4.11	Realisasi Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2024 Kabupaten Bireuen.....	IV-27
Tabel 4.12	Realisasi Pencapaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2024 Kabupaten Bireuen.....	IV-28
Tabel 4.13	Realisasi Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024 Kabupaten Bireuen.....	IV-30
Tabel 4.14	Realisasi Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2024 Kabupaten Bireuen.....	IV-30

Tabel 4.15	Realisasi Pencapaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2024 Kabupaten Bireuen.....	IV-31
Tabel 4.16	Realisasi Pencapaian SPM Bidang Sosial Tahun 2024 Kabupaten Bireuen.....	IV-32

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bireuen, Aceh dan Nasional Tahun 2019 – 2024.....	II-4
Gambar 2.2	Perkembangan Nilai PDRB Per Kapita Kabupaten Bireuen Tahun 2020 – 2024.....	II-5
Gambar 2.3	Perkembangan Laju Inflasi Kabupaten Bireuen Tahun 2018 – 2024.....	II-5
Gambar 2.4	Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Bireuen Tahun 2018–2024.....	II-6
Gambar 3.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bireuen Tahun 2019 – 2024.....	III-2
Gambar 3.2	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bireuen Tahun 2018 – 2024.....	III-3
Gambar 3.3	Angka Kemiskinan Kabupaten Bireuen Tahun 2018–2024.....	III-4
Gambar 3.4	Angka Pengangguran Kabupaten Bireuen Tahun 2018–2024.....	III-5
Gambar 3.5	PDRB Perkapita Kabupaten Bireuen Tahun 2020 – 2024.....	III-6
Gambar 3.6	Gini Rasio Kabupaten Bireuen Tahun 2018 – 2024.....	III-6

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia (Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008). Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan terbagi menjadi perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan. Ketiga bentuk perencanaan tersebut masing – masing terdapat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Kabupaten Bireuen (RPK) dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK). Hal ini sesuai amanat Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Amanah undang-undang tersebut dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Menindak lanjuti Peraturan dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022; Pemerintah Kabupaten Bireuen telah membentuk tim untuk menyusun RPK Bireuen tahun 2023-2026 dan tim untuk menyusun evaluasi RPK tahun 2024. Tujuan penyusunan ini untuk melakukan evaluasi pencapaian target rencana program dan kegiatan, penyerapan anggaran, serta kendala dan hambatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut.

1.2. Dasar Hukum

Landasan hukum Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kabupaten (RPK) Bireuen Tahun 2024, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi

Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;

6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 – 2024;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan perda tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022
11. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen.
12. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Kabupaten Bireuen Tahun 2023-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Pembangunan Kabupaten (RPK) Bireuen tahun 2024 dimaksudkan untuk memastikan bahwa target rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPK Bireuen dapat dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Bireuen tahun 2023-2026.

Adapun tujuan evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Pembangunan Kabupaten (RPK) Bireuen Tahun 2024, yaitu :

1. Mengetahui tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan dan dokumen pelaksanaan (RPK 2023-2026, RKPK 2024 dan APBK 2024).
2. Mengetahui tingkat keberhasilan kinerja beserta faktor penghambat dan pendorongnya.
3. Memastikan bahwa pelaksanaan program/kegiatan dalam RPK yang meliputi capaian target dan penyerapan anggaran telah sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan sehingga target pada akhir tahun dapat tercapai.
4. Mengetahui rincian penyerapan/realisasi anggaran yang dilaksanakan oleh masing-masing SKPK sampai tahun 2024.
5. Memberi masukan sebagai tindak lanjut yang diperlukan.

1.4 Sistematika Penulisan Hasil Evaluasi Pelaksanaan RPK 2024

Sistematika penyusunan laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan RPK Bireuen Tahun 2024 adalah sebagai berikut,

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang penyusunan laporan Evaluasi pelaksanaan RPK tahun 2024, landasan hukum, tujuan penulisan dan sistematika penulisan dokumen evaluasi RKPK.

BAB II RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah Tahun 2024.

BAB III CAPAIAN INDIKATOR MAKRO

Menguraikan tentang capaian indikator makro Kabupaten Bireuen pada tahun 2024 dan capaiannya bila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.

BAB IV HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RKPK TAHUN 2024

Menguraikan tentang jumlah dan anggaran program/kegiatan yang direncanakan dalam dokumen RPK 2024, tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan dan dokumen pelaksanaan (RPK 2023-2026, RKPK 2024 dan APBK 2024) serta realisasi pelaksanaan RPK tahun 2024 terhadap proyeksi kebijakan keuangan terdiri dari realisasi pendanaan yang mencakup realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan. Selain itu juga menguraikan hasil evaluasi program/kegiatan yang memuat metode evaluasi, hasil evaluasi capaian anggaran dan capaian kinerja.

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Menguraikan tentang kesimpulan dari evaluasi, faktor penghambat, serta cara penyelesaian yang diikuti oleh rekomendasi yang akan dilakukan untuk masa mendatang.

BAB II

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAN ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN KABUPATEN BIREUEN

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi

Rancangan kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah merupakan salah satu instrumen penting yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Kerangka ekonomi dan keuangan menggambarkan secara umum kondisi dan analisis statistik serta karakteristik perekonomian dan keuangan Kabupaten Bireuen tahun 2024. Didalam bab ini dibahas mengenai kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

2.1.1. Perekonomian Kabupaten Bireuen Tahun 2024

Kondisi perekonomian Bireuen Tahun 2024 dapat dilihat dari capaian indikator indikator yang mempengaruhi ekonomi yaitu Pertumbuhan PDRB, PDRB per kapita, inflasi, dan indeks gini.

2.1.1.1 Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator makro yang penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah pada suatu periode tertentu. PDRB digunakan sebagai dasar perhitungan laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Selain itu juga untuk melihat struktur ekonomi suatu wilayah, sebagai indikator tingkat kesejahteraan masyarakat dan disparitas sosial. PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah/wilayah dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya, sehingga besarnya PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan teknologi di daerah/wilayah tersebut.

PDRB Kabupaten Bireuen menggambarkan kemampuan daerah dalam mengelola dan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan jasa. Besarannya tergantung pada hasil penggunaan potensi faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, modal dan teknologi serta semangat berwirausaha masyarakatnya dalam melakukan kegiatan ekonomi.

PDRB merepresentasikan pendapatan daerah riil yang dihitung dari keseluruhan output dari barang dan jasa yang diproduksi suatu daerah. Syarat bagi suatu daerah dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila nilai PDRB atau pendapatan daerah riil mengalami kenaikan dari periode sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi diukur dengan perubahan atau kenaikan PDRB ADHK, yaitu keseluruhan nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu daerah dalam satu tahun. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari laju pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan yang disusun berdasarkan harga pada tahun dasar. PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan, dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bireuen pada tahun 2024 adalah sebesar 4,52 persen.

Nilai PDRB Kabupaten Bireuen dasar harga berlaku pada tahun 2024 sebesar 18,38 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 1.353 miliar rupiah dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu sebesar 17,03 triliun rupiah. Kenaikan nilai PDRB pada tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan tahun 2024 yang meningkat sebesar 1.559 miliar rupiah. Sedangkan berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB mengalami peningkatan, dari 11,30 triliun rupiah pada tahun 2023 menjadi 11,81 triliun rupiah pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan selama tahun 2024 Kabupaten Bireuen mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 4,52 persen, meningkat dibandingkan pertumbuhan tahun 2023 yang tumbuh sebesar 4,38 persen.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Bireuen pada tahun 2024 dihasilkan oleh lapangan usaha Jasa Keuangan dan asuransi yaitu mencapai 17,19 persen. Selanjutnya lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 16,75 persen. Berikutnya lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial sebesar 7,24 persen.

Tabel 2.1
Kontribusi Sektor dalam PDRB Kabupaten Bireuen Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
dan Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2020-2024

No	Sektor	Tahun									
		2020		2021		2022		2023		2024	
		ADH B	ADH K	ADH B	ADHK	ADH B	ADH K	ADH B	ADHK	ADH B	ADHK
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	34,57	3,87	33,62	-0,90	33,93	3,53	33,72	4,11	32,88	1,00
2	Pertambangan dan penggalan	2,16	2,96	2,25	7,06	2,27	1,71	2,13	2,57	2,05	1,14
3	Industri pengolahan	1,51	-2,93	1,5	0,71	1,52	3,71	1,39	-1,76	1,35	1,62
4	Pengadaan listrik dan gas	0,08	7,66	0,07	3,64	0,07	5,83	0,07	3,98	0,07	6,18
5	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	0,07	0,75	0,06	2,3	0,06	9,47	0,06	3,21	0,06	1,22
6	Konstruksi	9,90	6,31	9,56	1,01	9,40	0,73	8,97	2,46	8,70	4,58
7	Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor	21,17	-4,97	21,56	4,55	21,51	5,62	22,73	7,75	23,46	4,77

No	Sektor	Tahun									
		2020		2021		2022		2023		2024	
		ADH B	ADH K	ADH B	ADHK	ADH B	ADH K	ADH B	ADHK	ADH B	ADHK
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
8	Transportasi dan pergudangan	6,25	20,14	7,42	25,19	7,85	5,33	8,51	4,15	9,21	16,75
9	Penyediaan akomodasi dan makan minum	1,23	-3,62	1,06	0,19	1,34	30,59	1,39	9,43	1,34	0,85
10	Informasi dan komunikasi	2,41	11,86	2,38	8,23	2,42	10,32	2,37	4,31	2,21	1,49
11	Jasa keuangan dan asuransi	1,26	2,77	1,17	-1,28	1,12	-1,24	0,98	-7,03	1,09	17,19
12	Real estate	3,29	-0,55	3,13	3,1	2,99	3,49	2,79	2,13	2,64	2,43
13	Jasa perusahaan	0,35	3,20	0,33	1,93	0,37	10,99	0,34	-1,33	0,33	4,17
14	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	9,28	-0,13	9,32	5,2	8,54	-0,08	8,29	2,91	8,49	7,24
15	Jasa Pendidikan	2,03	2,47	1,99	1,56	1,88	3,26	1,77	1,81	1,80	2,67
16	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	2,94	6,01	3,13	9,83	3,26	9,85	3,03	-1,11	2,97	2,23
17	Jasa lainnya	1,50	1,23	1,45	2,27	1,47	11,49	1,46	4,44	1,35	3,72
	PDRB ADHB	100	-1,02	100	4,09	100	4,35	100	4,38	100	4,52

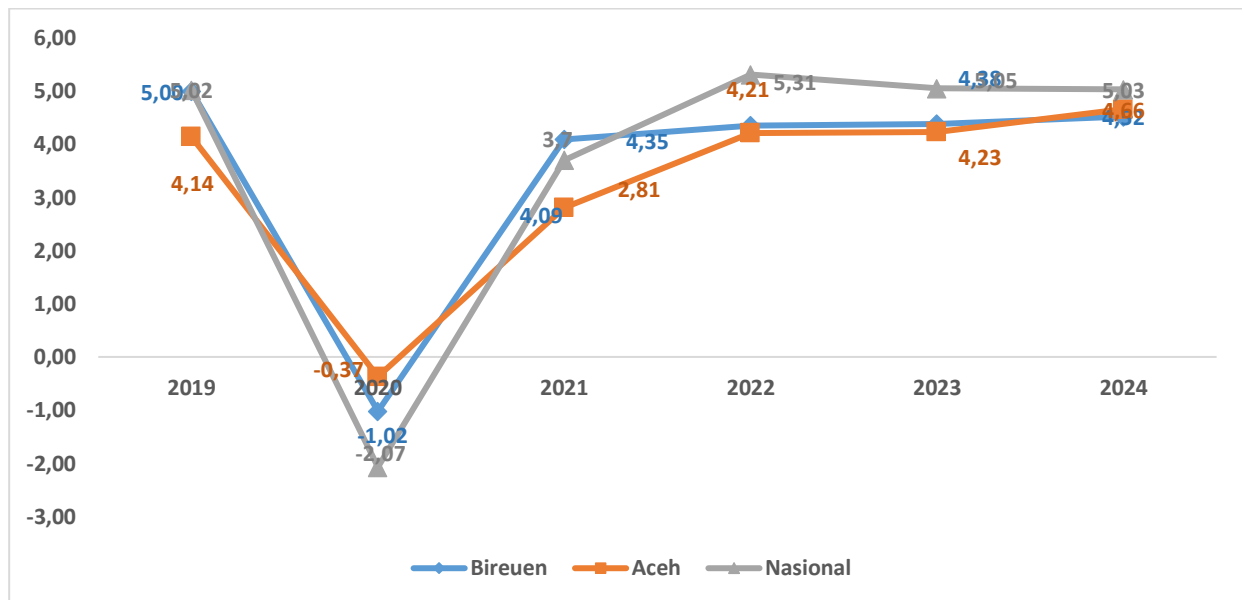
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen, Tahun 2024

Lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan masih menjadi yang paling berpengaruh di Bireuen, dengan andil mencapai 32,88 persen, kemudian di tempat kedua lapangan usaha perdagangan, reparasi mobil dan sepeda motor dengan andil 23,46 persen. Kemudian disusul lapangan usaha transportasi dan pergudangan juga cukup besar kontribusinya 9,21 persen.

2.1.1.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang

dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.



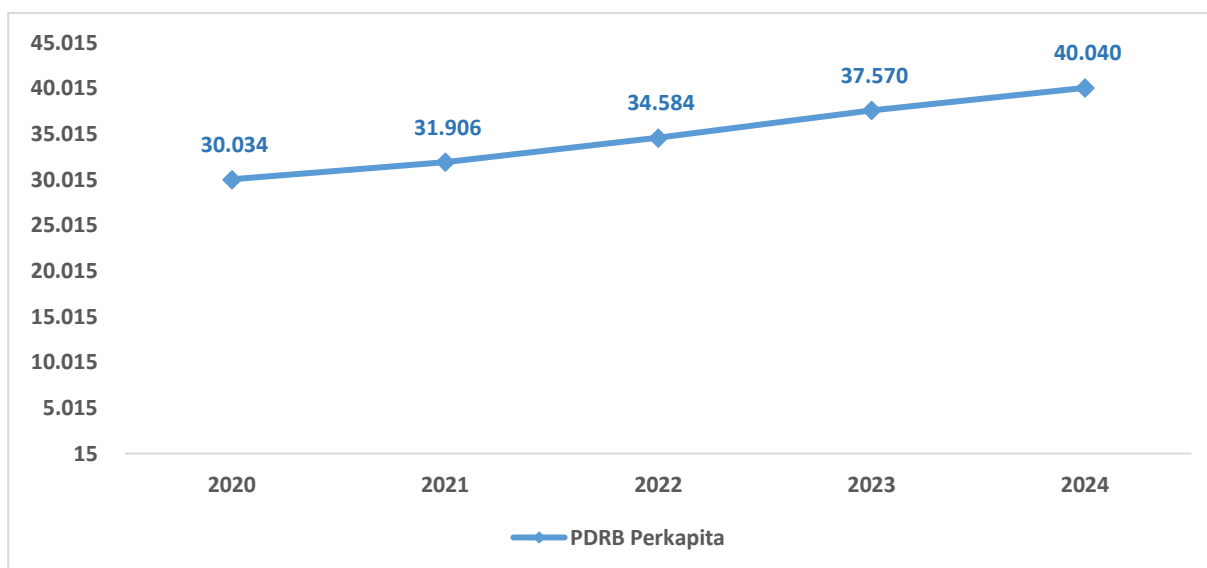
Gambar 2.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bireuen, Aceh dan Nasional
Tahun 2019 – 2024

Berdasarkan Gambar 2.1 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bireuen sepanjang periode tahun 2019-2024 mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2019 angka pertumbuhan ekonomi mencapai 5 persen pada tahun 2019, kemudian turun menjadi minus 1,02 persen pada tahun 2020. Untuk tahun 2024 berdasarkan rilis dari BPS Kabupaten Bireuen angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bireuen meningkat cukup besar menjadi 4,52 persen.

2.1.1.3 PDRB Perkapita

PDRB perkapita merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah/daerah. Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/ wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk.

PDRB perkapita diperoleh dari hasil bagi antara PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang bersangkutan. Jadi besarnya PDRB perkapita tersebut sangat dipengaruhi oleh kedua variabel diatas. Oleh karena itu besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

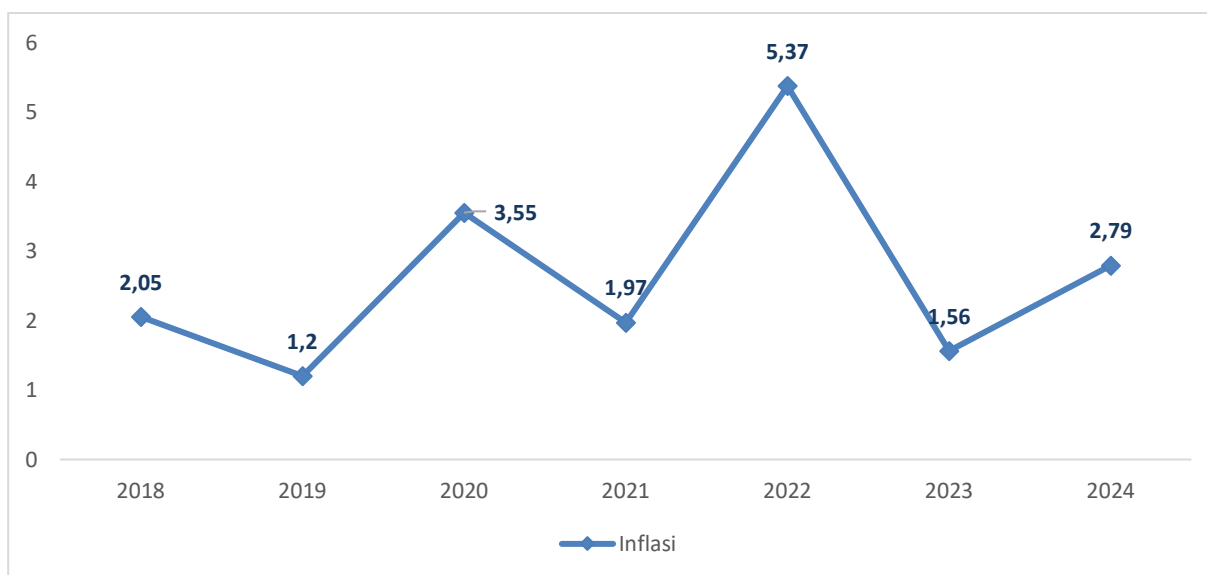


Gambar 2.2
Perkembangan Nilai PDRB Per Kapita Kabupaten Bireuen
Tahun 2020 – 2024

Berdasarkan Gambar 2.2 nilai PDRB perkapita Kabupaten Bireuen atas dasar harga berlaku sejak tahun 2020 hingga 2024 mengalami kenaikan *on the track*. Pada tahun 2020 PDRB per kapita tercatat sebesar 30,034 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2024 mencapai 40,040 juta rupiah. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini masih dipengaruhi oleh faktor inflasi.

2.1.1.4. Laju Inflasi

Inflasi merupakan tingkat kenaikan harga-harga yang terjadi secara umum pada suatu tahun tertentu. Seberapa besar laju inflasi yang terjadi selama ini di Kabupaten Bireuen dapat dicermati dari angka inflasi di Kota Lhokseumawe.

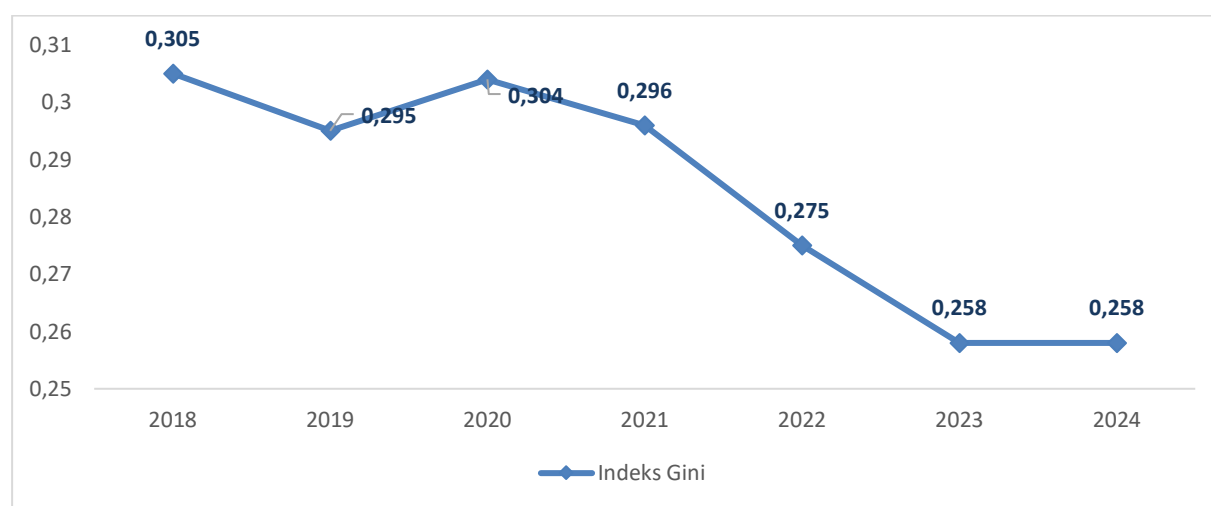


Gambar 2.3
Perkembangan Laju Inflasi Kabupaten Bireuen Tahun 2018 – 2024

Berdasarkan Gambar 2.3 inflasi Kabupaten Bireuen sejak tahun 2018 hingga 2024 mengalami fluktuatif moderat. Pada tahun 2018 inflasi Kabupaten Bireuen tercatat sebesar 2,05 persen, terus mengalami fluktuatif hingga tahun 2024 mencapai 2,79 persen.

2.1.1.5. Indeks Gini

Indeks gini merupakan satu ukuran untuk melihat ketimpangan pendapatan antar masyarakat, sehingga daerah dapat mempergunakan indeks gini untuk mengukur derajat ketidak merataan distribusi pendapatan yang terjadi. Nilai indeks gini berkisar antara 0 dan 1. Jika bernilai nol artinya pemerataan pendapatan secara sempurna dan sebaliknya jika bernilai satu berarti ketimpangan tidak sempurna. Indeks gini lebih kecil dari 0,4 menunjukkan tingkat ketimpangan rendah, nilai 0,4-0,5 menunjukkan tingkat ketimpangan sedang dan nilai lebih besar dari 0,5 menunjukkan tingkat ketimpangan tinggi.



Gambar 2.4
Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Bireuen Tahun 2018 – 2024

Terlihat pada Gambar 2.4 Indeks gini Kabupaten Bireuen tahun 2018 adalah 0,305, terus mengalami penurunan secara moderat mencapai angka 0,258 pada tahun 2024. Angka ini menunjukkan Kabupaten Bireuen termasuk kategori ketimpangan rendah.

2.1.2. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah

Prediksi kemampuan keuangan ini merupakan kapasitas keuangan yang bersifat indikatif, yakni tidak kaku dan disesuaikan dengan kondisi terkini disaat perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya. Proyeksi pendapatan dan belanja serta pengeluaran pembiayaan wajib dan mengikat serta prioritas utama, maka dapat diproyeksi kapasitas riil keuangan daerah yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan selama lima tahun dalam Rencana Pembangunan Kabupaten Bireuen tahun 2023-2026.

Penerimaan Bireuen yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bireuen diperoleh dari berbagai sumber diantaranya dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten, berupa pajak dan retribusi Kabupaten, bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak, dana perimbangan berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan

penerimaan lain-lain yang sah. Dari semua penerimaan tersebut yang memberikan kontribusi yang cukup besar berasal dari instansi yang lebih tinggi atau bantuan dari pemerintah pusat, sedangkan sumber penerimaan kabupaten yang berasal dari Penerimaan Kabupaten Sendiri (PKS) masih terlalu kecil dibandingkan dengan bantuan pusat sehingga faktor ketergantungan Kabupaten Bireuen kepada pemerintah pusat sangat tinggi. Hal ini menunjukkan, bahwa Kabupaten Bireuen selama ini dalam pembiayaan administrasi pemerintahan dan pembangunan masih sangat tergantung dari Pemerintah Pusat, terutama untuk Belanja Pegawai berupa gaji yang masih diharapkan dari Pemerintah Pusat. Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Bireuen telah melakukan langkah-langkah kebijakan untuk meningkatkan pendapatan daerah. Adapun langkah-langkah kebijakan yang telah diambil dalam rangka meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli adalah melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi. Usaha melalui intensifikasi antara lain meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait serta meningkatkan kinerja aparat Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten (SKPK) yang menyumbang Pendapatan Kabupaten Bireuen. Sedangkan langkah-langkah usaha ekstensifikasi pendapatan Bireuen adalah melalui peningkatan pajak, retribusi, dan zakat.

Tabel 2.2
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen
Tahun 2024

KODE AKUN	URAIAN	Jumlah Anggaran RPK	Realisasi	%
4	PENDAPATAN DAERAH	1.967.960.704.183,40	2.028.947.517.938,58	103,10
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	193.419.557.875,00	192.053.763.900,58	99,29
4 2	PENDAPATAN TRANSFER	1.770.541.146.308,40	1.806.710.553.793,00	102,04
4 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	4.000.000.000,00	30.183.200.245,00	754,58
5	BELANJA DAERAH	1.976.580.791.670,00	2.090.793.905.181,34	105,78
5 1	BELANJA OPERASI	1.182.552.836.289,00	1.326.217.382.946,34	112,15
5 2	BELANJA MODAL	249.223.978.725,00	206.289.898.235,00	82,77
5 3	BELANJA TIDAK TERDUGA	20.227.500.000,00	-	-
5 4	BELANJA TRANSFER	524.576.476.656,00	558.286.624.000,00	106,43
6	PEMBIAYAAN DAERAH	8.620.087.486,26	71.981.484.192,67	835,04

Sumber : BPKD Kabupaten Bireuen, 2024

Pada tabel 2.2 di atas, dapat diketahui realisasi pendapatan Kabupaten Bireuen mencapai 103,10 persen dari yang ditargetkan dalam RPK 2024. Kontribusi hal ini disebabkan meningkatnya pendapatan transfer sebesar 102,04 persen dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar 754,58 persen dari yang diproyeksikan. Sedangkan dari sisi belanja daerah, realisasinya meningkat sebesar 105,78 persen dari yang diproyeksikan pada RPK tahun 2024. Kontribusi hal ini disebabkan oleh meningkatnya belanja operasi sebesar 112,15 persen dan belanja transfer sebesar 106,43 persen dari proyeksi RPK tahun 2024. Sedangkan faktor pendukungnya adalah tidak adanya belanja tidak terduga yang disebabkan pulihnya keadaan dari pandemi dan menurunnya belanja modal dari yang ditargetkan oleh RPK tahun 2024. Sedangkan dari segi pembiayaan meningkat sebesar 835,04

persen karena kontribusi terbesarnya meningkatnya sisa lebih penghitungan anggaran pada tahun sebelumnya.

BAB III CAPAIAN INDIKATOR MAKRO

Untuk mengukur suatu keberhasilan di satu daerah ditunjukkan dengan keberhasilan capaian dari rencana yang sudah ditargetkan dalam dokumen perencanaan. Akan tetapi, capaian indikator *outcome* (hasil) dan *impact* (dampak) memerlukan waktu untuk menunjukkan perkembangannya. Berbeda halnya dengan indikator *output* (keluaran) yang capaiannya dapat diketahui langsung pada saat kegiatan tersebut dilaksanakan. Sehingga untuk mengukur kemajuan dari perangkat daerah, maka kemajuan penyerapan anggaran menjadi tolok ukurnya.

Untuk mengukur suatu keberhasilan di satu daerah ditunjukkan dengan keberhasilan capaian dari rencana yang sudah ditargetkan dalam dokumen perencanaan. Ada 6 indikator makro yang target capaiannya telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, yaitu pertumbuhan PDRB, IPM, Persentase Penduduk Miskin, Pengangguran Terbuka, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, dan laju Inflasi. Adapun metode evaluasi yang digunakan adalah analisis GAP. Yaitu analisis yang membandingkan kesenjangan antara target dan realisasi. Untuk persentase capaian yang lebih kecil dari 100 persen (<100) maka indikator tersebut tidak berhasil dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Sedangkan untuk persentase yang mencapai dan melebihi dari 100 persen (≥ 100) maka indikator tersebut berhasil dicapai sesuai atau melebihi dari target yang telah ditetapkan. Adapun 6 indikator makro yang akan disajikan, belum diketahui hasilnya secara *existing*. Oleh karena itu sebagai data sementara, maka digunakan data pada tahun lalu karena dianggap relevan digunakan saat ini. Untuk keterangan lebih lanjut mengenai capaian dari Indikator Makro tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1.
Capaian Indikator Makro Kabupaten Bireuen Tahun 2024

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Persentase
1	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,8	4,52	Tidak Tercapai	97
2	IPM	Indeks	73,1	75,39	Melebihi Target	103
3	Persentase Penduduk Miskin	Persen	11,75	12,1	Melebihi Target	97
4	Pengangguran Terbuka	Persen	3,65	3,93	Tidak Tercapai	92
5	PDRB per kapita	Rp.(juta)	25,31	34,73	Melebihi Target	137
6	Ketimpangan pendapatan	Indeks	0,287	0,258	Melebihi Target	110

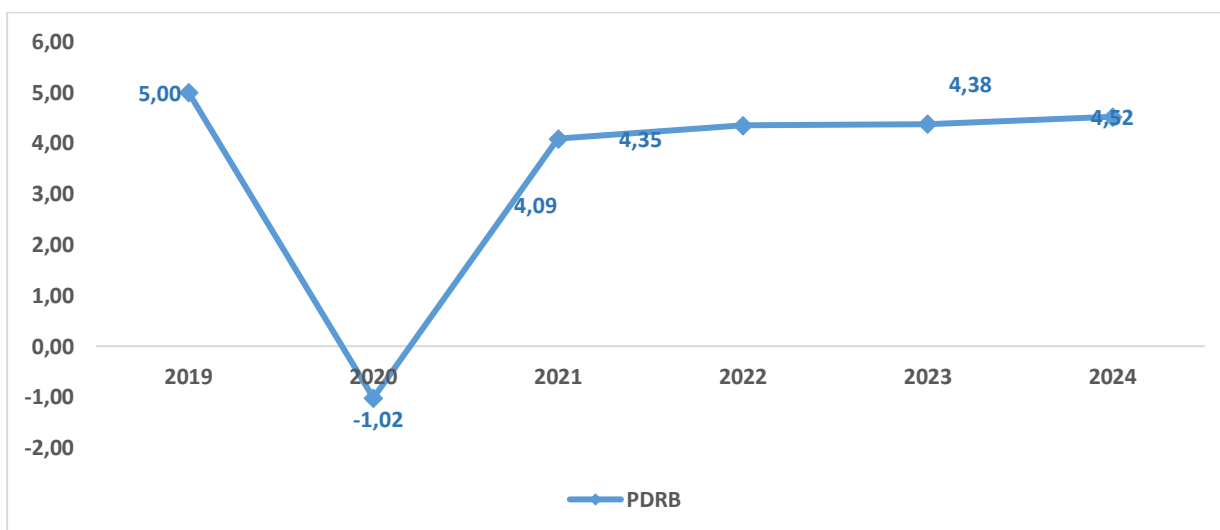
Sumber : Data BPS, 2024 (data diolah)

Dari tabel di atas dapat kita simpulkan, dari 6 indikator makro ada 4 indikator yang berhasil dicapai bahkan kesemuanya melebihi dari target yang telah dicapai. Hal ini ditandai dengan persentase capaian yang melebihi dari 100 persen dari target yang telah ditetapkan. Sedangkan

Indikator makro yang tidak berhasil dicapai ada 2 indikator, hal ini ditandai dengan persentase capaian yang tidak mencapai 100% dari target yang telah ditentukan.

3.1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bireuen Tahun 2019-2024

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

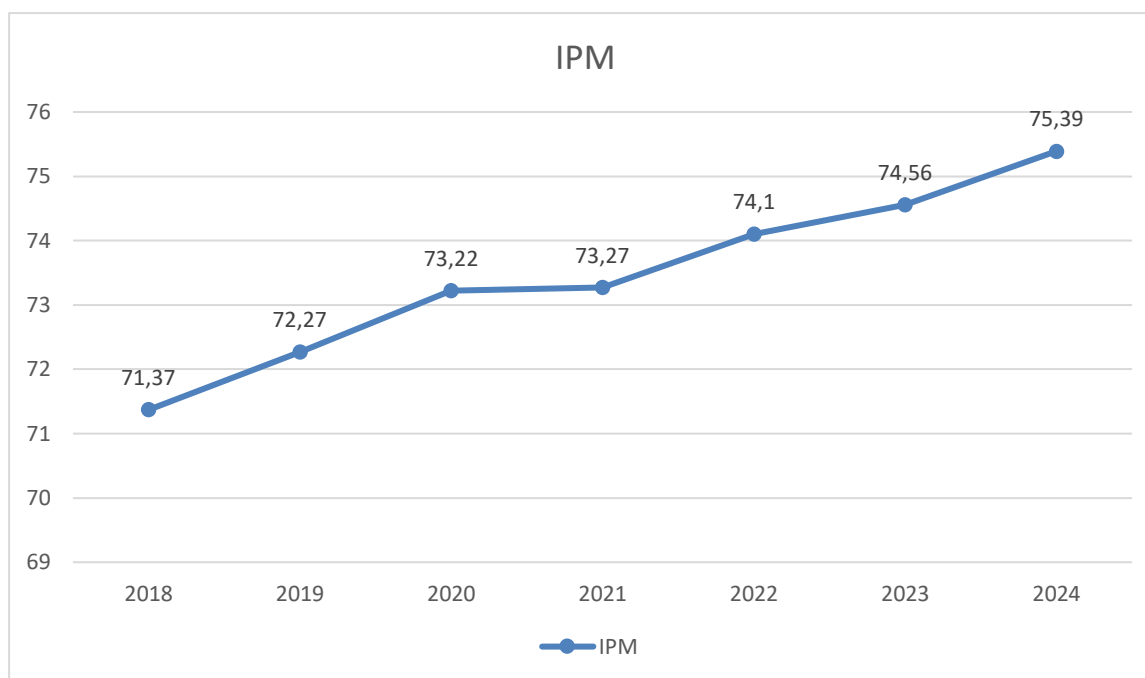


Gambar 3.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bireuen Tahun 2019 – 2024

Berdasarkan Gambar 3.1 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bireuen sepanjang periode tahun 2019-2024 mengalami peningkatan secara moderat, dimana pada tahun 2019 angka pertumbuhan ekonomi mencapai 5 persen pada tahun 2019, kemudian turun menjadi minus 1,02 persen pada tahun 2020. Untuk tahun 2024 berdasarkan rilis dari BPS Kabupaten Bireuen angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bireuen meningkat cukup besar menjadi 4,52 persen.

3.2 IPM Kabupaten Bireuen Tahun 2018-2024

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Melalui pendekatan tiga dimensi dasar yang mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan layak. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

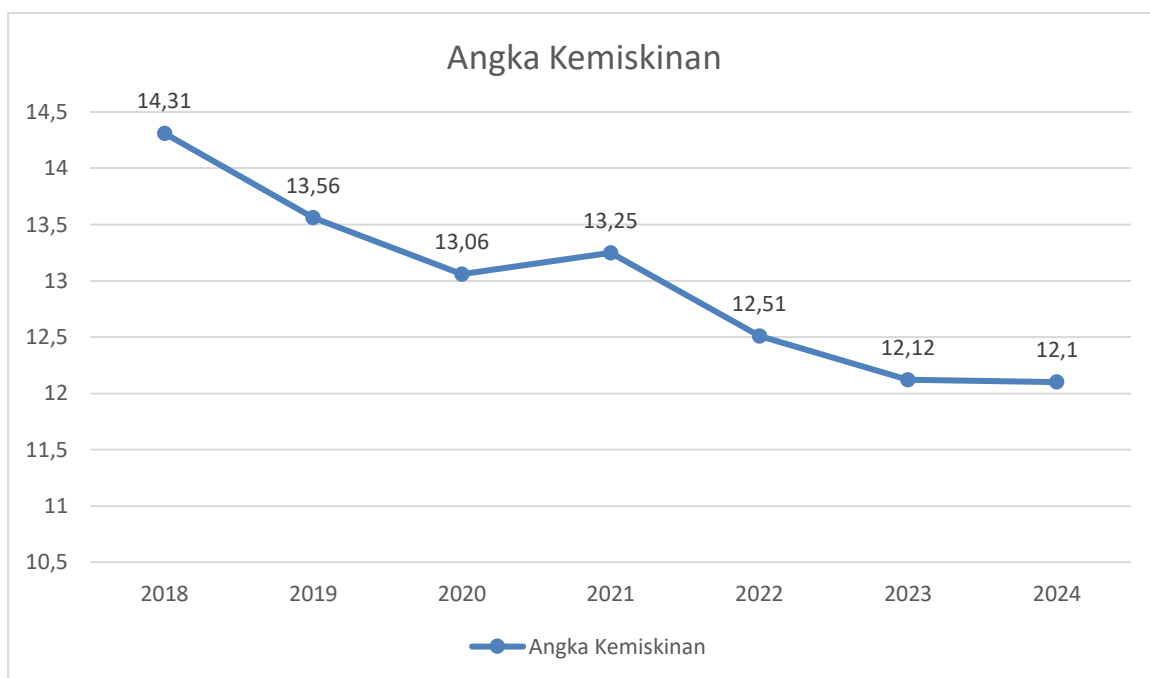


Gambar 3.2
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bireuen Tahun 2018 – 2024

Berdasarkan Gambar 3.2 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bireuen sepanjang periode tahun 2018-2024 mengalami peningkatan secara *on the track*, dimana pada tahun 2018 angka IPM Kabupaten Bireuen mencapai 71,37, meningkat hingga 72,27 pada tahun 2019 dan terus meningkat setiap tahunnya menjadi 75,39 pada tahun 2024. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia terutama diperkirakan karena Kabupaten Bireuen mampu mempertahankan kinerjanya pada dunia pendidikan, kesehatan, dan perekonomian.

3.3 Angka Kemiskinan Kabupaten Bireuen Tahun 2018-2024

Secara umum, kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Konsep yang dipakai BPS dan juga beberapa negara lain adalah kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*), sehingga kemiskinan merupakan kondisi ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan (diukur dari sisi pengeluaran). Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah Garis Kemiskinan (GK), yang diperoleh dari hasil survei (sampel). Angka kemiskinan yang dirilis BPS merupakan data makro dan merupakan hasil Susenas (Survey Sosial Ekonomi Nasional) yang menunjukkan persentase penduduk miskin terhadap jumlah penduduk dalam suatu wilayah.

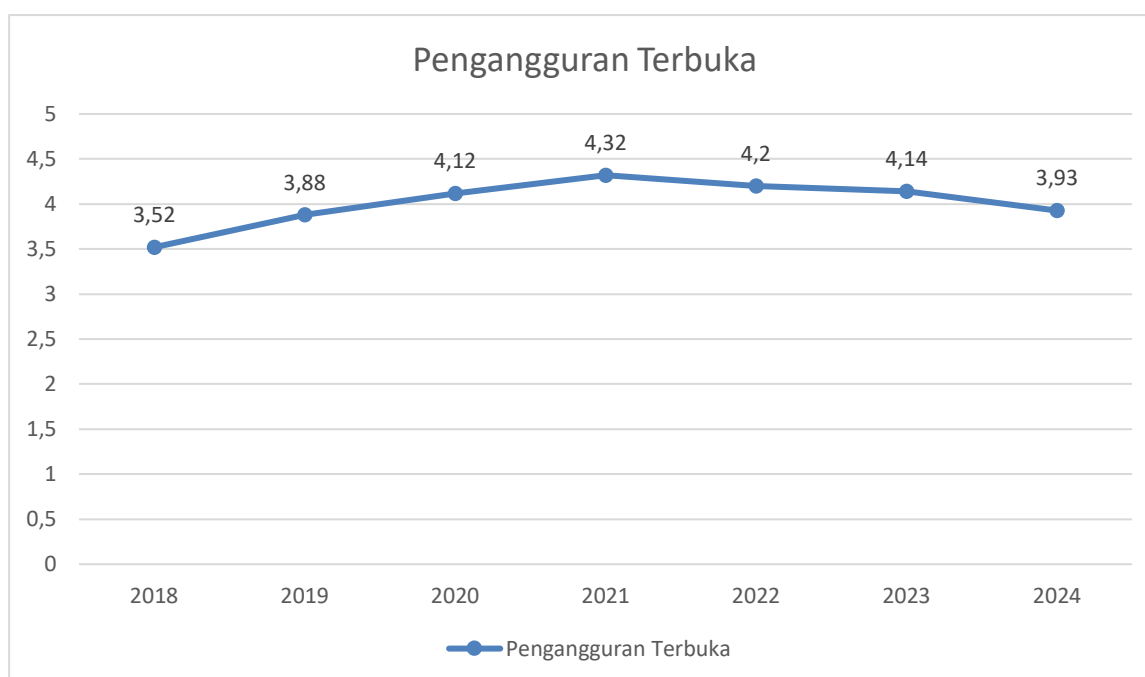


Gambar 3.3
Angka Kemiskinan Kabupaten Bireuen Tahun 2018 – 2024

Berdasarkan Gambar 3.3 Angka Kemiskinan Kabupaten Bireuen sepanjang periode tahun 2018-2023 mengalami penurunan secara moderat, dimana pada tahun 2018 Kemiskinan Kabupaten Bireuen mencapai 14,31 persen, menurun secara moderat hingga 12,1 pada tahun 2024. Walaupun sempat mengalami kenaikan, namun secara garis besar sebagaimana yang ditunjukkan oleh grafik di atas Angka Kemiskinan di Kabupaten Bireuen mengalami penurunan.

3.4 Pengangguran Terbuka Kabupaten Bireuen Tahun 2018-2024

Pengangguran terbuka adalah orang yang memiliki kualifikasi cukup, tetapi tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan. Fenomena tersebut dapat ditemukan dengan mudah di lingkungan masyarakat, khususnya terjadi pada lulusan baru universitas. Dalam konteks ini, seseorang bisa saja tengah mempersiapkan usaha, masih dalam proses wawancara maupun sudah mendapatkan kontrak, namun belum secara resmi mulai bekerja.

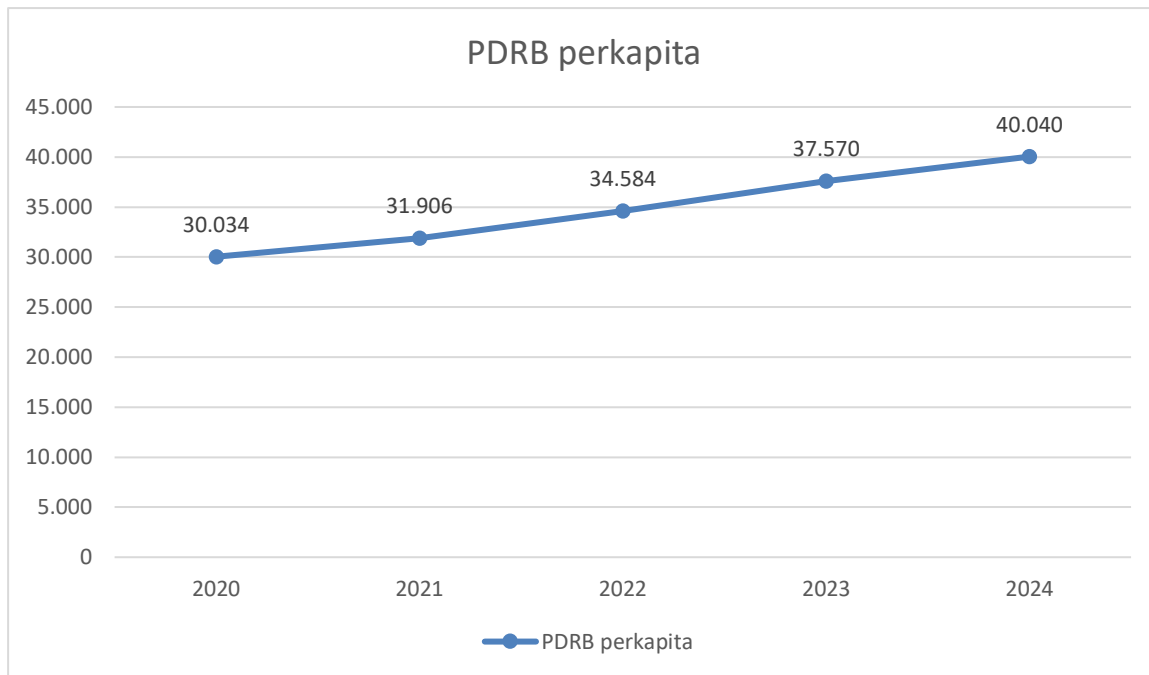


Gambar 3.4
Angka Pengangguran Kabupaten Bireuen Tahun 2018 – 2024

Berdasarkan Gambar 3.4 Angka Pengangguran Kabupaten Bireuen sepanjang periode tahun 2018-2023 mengalami fluktuatif secara moderat, dimana pada tahun 2018 Angka Pengangguran Kabupaten Bireuen mencapai 3,52 persen, meningkat secara on the track hingga 4,32 persen pada tahun 2021. Kemudian mengalami penurunan secara on the track hingga tahun 2024 sebesar 3,93 persen.

3.5 PDRB ADHB per Kapita Kabupaten Bireuen Tahun 2020-2024

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB ADHB per kapita. yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu. besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB ADHB per kapita. Sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB ADHB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB ADHB per kepala atau per satu orang penduduk. Hasil penghitungan PDRB ADHB per kapita sebenarnya tidak dapat secara langsung digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran dan kesejahteraan suatu wilayah. Hal ini disebabkan pendapatan per kapita kurang memerhatikan aspek distribusi pendapatan.

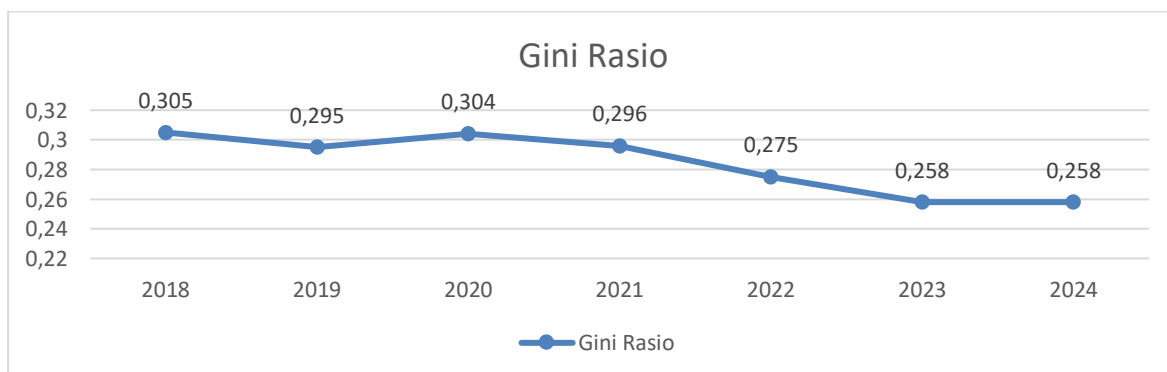


Gambar 3.5
PDRB ADHB Perkapita Kabupaten Bireuen Tahun 2020 – 2024

Pada Gambar 3.5 nilai PDRB ADHB per kapita Kabupaten Bireuen atas dasar harga berlaku sejak tahun 2020 hingga 2024 senantiasa mengalami peningkatan secara *on the track*. Pada tahun 2020 PDRB per kapita tercatat sebesar 30,034 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2024 mencapai 40,040 juta rupiah. Kenaikan angka PDRB ADHB per kapita yang cukup tinggi ini masih dipengaruhi oleh peningkatan inflasi.

3.6 Ketimpangan Pendapatan Kabupaten Bireuen Tahun 2018-2024

Ketimpangan Pendapatan (Gini Rasio) merupakan satu ukuran untuk melihat ketimpangan pendapatan antar masyarakat, sehingga daerah dapat mempergunakan Gini Rasio untuk mengukur derajat ketidakmerataan distribusi pendapatan yang terjadi. Nilai rasio gini berkisar antara 0 dan 1. Koefisien gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna. Sebaliknya, Gini Rasio yang bernilai 1 mengindikasikan adanya pemerataan pendapatan yang tidak sempurna, atau dengan kata lain terjadi ketimpangan sempurna.



Gambar 3.6
Gini Rasio Kabupaten Bireuen Tahun 2018 – 2024

Pada Gambar 3.6 nilai Gini Rasio Kabupaten Bireuen sejak tahun 2018 hingga 2023 mengalami penurunan secara moderat. Pada tahun 2018 Gini Rasio Kabupaten Bireuen tercatat sebesar 0,305 dan pada tahun 2024 sebesar 0,258. Walaupun sempat terjadi kenaikan, namun secara trend, Gini Rasio Kabupaten Bireuen mengalami penurunan.

BAB IV HASIL EVALUASI RPK BIREUEN TAHUN 2024

4.1 Metode Evaluasi

Metode pelaksanaan Pelaksanaan Evaluasi RPK Bireuen Tahun 2024 dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Mengirimkan permintaan data capaian kinerja baik *outcome* maupun *output* dan capaian penyerapan anggaran dari masing-masing SKPK.
2. Melakukan verifikasi dan konfirmasi terhadap data yang telah dikirimkan SKPK untuk memastikan data yang dikirim tepat dan akurat.
3. Menggunakan analisis GAP untuk membandingkan antara capaian yang telah diraih dengan target yang telah ditetapkan sebagai indikator dalam RPK tahun 2023-2026.
4. Melakukan penilaian kinerja berdasarkan kriteria kinerja yang telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Untuk mengukur capaian kinerja dan keuangan SKPK, maka ditetapkanlah kriteria penilaian kinerja. Adapun kriteria penilaian kinerja tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang dapat dilihat pada tabel berikut,

**Tabel 4.1
Kriteria Kinerja**

No.	Interval Nilai Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi	ST
2.	76 % ≤ 90 %	Tinggi	T
3.	66 % ≤ 75 %	Sedang	S
4.	51 % ≤ 65 %	Rendah	R
5.	≤50 %	Sangat Rendah	SR

4.2. Hasil Evaluasi Pelaksanaan IKU dan IKD RPK Tahun 2024

4.2.1 Tujuan Memperkuat Pelaksanaan Syariah dalam Tatanan Kehidupan Bermasyarakat

Tujuan ini memiliki indikator Indeks Penerapan Syariat, memiliki target 90 persen pada tahun 2024. Untuk mengetahui capaian indikator tujuan ini beserta sasaran dan program yang mendukungnya dapat melihat tabel berikut.

**Tabel 4.2
Capaian Tujuan I RPK TAHUN 2024 , Sasaran dan program pendukungnya**

No	Indikator Kinerja	Satuan	2024		Nilai Capaian
			Target	Realisasi	

1	Indeks Penerapan Syariat	Persen	90	76,33	85
a.	Tingkat Pelanggaran Syariat Islam yang Diselesaikan	Persen	100	100	100
-	Jumlah Gampong yang mengadakan pengajian rutin	Gampong	609	609	100
-	Persentase sidang yang menghasilkan keputusan	Persen	50	100	200
b.	Persentase dayah yang naik kelas	Persen	41,3	12,17	29
-	Jumlah dayah yang Terakreditasi	Dayah	164	190	116
c.	Jumlah Kearifan Lokal yang Dilestarikan	Adat	18	18	100
-	Jumlah Urusan Pemerintah yang Menggunakan Kearifan Lokal	Urusan	8	8	100
-	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat yang Aktif	Lembaga	5	5	100
-	Persentase Karya Budaya yang Direvitalisasi	Persen	84,62	84,62	100
-	Persentase Kelompok Kesenian yang Dibina	Persen	74	74	100

Melalui informasi tabel di atas, maka diketahui bahwa:

1. Tujuan Memperkuat Pelaksanaan Syariah dalam Tatanan Kehidupan Bermasyarakat yang memiliki indikator Indeks Penerapan Syariat Islam belum mencapai target yang telah ditentukan. Dari target 90 indeks, capaian yang diperoleh adalah 76,33 indeks dengan tingkat capaian mencapai 85 persen dengan kriteria Tinggi (T). Faktor penghambatnya adalah tidak tercapainya target dayah yang naik kelas dari yang telah ditetapkan.
2. Sasaran Meningkatnya Nilai-Nilai Syariat Islam Dalam Tatanan Kehidupan Bermasyarakat yang memiliki indikator Tingkat Pelanggaran Syariat Islam yang Diselesaikan telah mencapai target yang telah ditetapkan. Dari target 100 persen, capaian yang diperoleh sebesar 100 persen dengan tingkat capaian mencapai 100 persen dengan kriteria Sangat Tinggi (ST). Faktor pendorongnya adalah Pemerintah Kabupaten Bireuen mampu membuat penanganan terhadap seluruh kasus pelanggaran syariat islam.
3. Sasaran Meningkatnya Mutu Pendidikan Keislaman yang memiliki indikator Persentase Tipe Dayah yang Naik Kelas belum mencapai target yang telah ditetapkan. Dari target 41,3 persen, capaian yang diperoleh sebesar 12,17 persen dengan tingkat capaian mencapai 29 persen dengan kriteria Sangat Tinggi (ST). Faktor penghambatnya adalah perlambatan peningkatan infrastruktur, jumlah murid dan jumlah tenaga pendidik.
4. Sasaran Meningkatnya Tatanan Budaya dan Adat Istiadat yang Islami yang memiliki indikator Jumlah Kearifan Lokal yang Dilestarikan telah mencapai target yang telah ditetapkan. Dari target 18 adat, capaian yang diperoleh sebesar 18 adat dengan tingkat capaian mencapai 100 persen dengan kriteria Sangat Tinggi (ST). Faktor pendorongnya adalah keberhasilan program-program pendukung sasaran mencapai target yang telah ditentukan. Dari 4 program pendukung yang mendukung capaian sasaran ini, kesemuanya telah mencapai target yang telah ditentukan dalam perencanaan Perubahan RPKP atau mencapai tingkat capaian 100 persen.

4.2.2 Tujuan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel

Tujuan ini memiliki indikator Indeks Reformasi Birokrasi, memiliki target indeks B pada tahun 2024. Untuk mengetahui capaian indikator tujuan ini beserta sasaran dan program yang mendukungnya dapat melihat tabel berikut.

Tabel 4.3
Capaian Tujuan II RPK TAHUN 2024 , Sasaran dan program pendukungnya

No	Indikator Kinerja	Satuan	2024		Nilai Capaian
			Target	Realisasi	
2	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	B	B	100
a.	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	100
-	Terintegrasi Program-program DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada / Tidak ada	Ada	Ada	100
-	Persentase Realisasi Kinerja Keuangan Daerah	Persen	96	95,8	100
-	Persentase Peningkatan Manajemen Aset Daerah	Persen	100	80	80
b.	Level Maturitas SPIP Terintegrasi	Level	2	3	150
-	Persentase Tindak Lanjut Temuan	Persen	90	84,5	94
-	Persentase Perangkat Daerah yang Mendapat Pendampingan	Persen	100	100	100
c.	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	Skor	B	B	100
-	Cakupan Pelayanan Dokumen Kependudukan	Persen	90	94,73	108
-	Cakupan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen	Persen	100	78,95	79
-	Tersedianya Database Kependudukan	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	100
-	Tersedianya Profil Kependudukan	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	100
-	Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat yang Dilaksanakan	Persen	100	100	100
-	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintah Umum	Persen	100	100	100
-	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100
d.	Indeks SPBE	Indeks	2,26	2,32	103
-	Jumlah Aplikasi e-Government yang Digunakan SKPK	Aplikasi	80	145	181
-	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	87	97,8	112
-	Tersedianya Data Statistik Sektoral	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	100
-	Tersedianya Dokumen Perencanaan yang Ditetapkan dengan Perda/Perkada	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	100
-	Persentase Konsistensi Program Antara RPJM dengan APBK	Persen	100	93,89	94
-	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku	Persen	25	13,5	54
-	Persentase SKPK yang Telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah	Persen	50	92	184
-	Persentase Tata Kelola Kepegawaian Sesuai	Persen	96	92,18	96

	Manajemen ASN				
-	Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	Persen	34,15	31,23	91

Melalui informasi tabel di atas, maka diketahui bahwa:

1. Tujuan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel yang memiliki indikator Indeks Reformasi Birokrasi telah mencapai target yang telah ditentukan. Dari target indeks B, capaian yang diperoleh adalah indeks B dengan tingkat capaian mencapai 100 persen dengan kriteria Sangat Tinggi (ST). Faktor pendukungnya adalah kemampuan Pemerintah Kabupaten Bireuen meningkatkan kualitas pelayanan publik terutama dari sisi digitalisasi. Hal ini terlihat dari capaian indeks SPBE yang meningkat melebihi dari target yang telah ditentukan.
2. Sasaran Terwujudnya Pemerintahan yang Baik dan Bersih Serta Bertanggung Jawab yang memiliki indikator Opini BPK telah mencapai target yang telah ditentukan. Dari target opini WTP, capaian yang diperoleh adalah opini WTP dengan tingkat capaian mencapai 100 persen dengan kriteria Sangat Tinggi (ST). Faktor pendukungnya adalah kemampuan Pemerintah Kabupaten Bireuen menyajikan laporan secara wajar sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
3. Sasaran Meningkatnya Tingkat Maturitas SPIP yang memiliki indikator Level Maturitas SPIP Terintegrasi telah melampaui target yang telah ditentukan. Dari target level 2, capaian yang diperoleh adalah level 3 dengan tingkat capaian mencapai 150 persen dengan kriteria Sangat Tinggi (ST). Faktor pendukungnya adalah meningkatnya kemampuan Pemerintah Kabupaten Bireuen dalam melakukan pengendalian internal.
4. Sasaran Terwujudnya Pelayanan Publik yang Berkualitas yang memiliki indikator Tingkat Akuntabilitas Kinerja telah mencapai target yang telah ditentukan. Dari target skor B, capaian yang diperoleh adalah skor B dengan tingkat capaian mencapai 100 persen dengan kriteria Sangat Tinggi (ST). Faktor pendukungnya adalah kemampuan Pemerintah Kabupaten Bireuen meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya dan pencapaian kinerja.
5. Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Kelembagaan Layanan Administrasi Pemerintahan serta Layanan Publik Berbasis Elektronik yang memiliki indikator Indeks SPBE telah melampaui target yang telah ditentukan. Dari target 2,26 indeks, capaian yang diperoleh adalah 2,32 indeks dengan tingkat capaian mencapai 103 persen dengan kriteria Sangat Tinggi (ST). Faktor pendukungnya adalah meningkatnya domain pendukung penilaian SPBE khususnya domain pelayanan SPBE.

4.2.3 Tujuan Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan

Tujuan ini memiliki indikator Persentase Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan dengan target 78,33 persen pada tahun 2024. Untuk mengetahui capaian indikator tujuan ini beserta sasaran dan program yang mendukungnya dapat melihat tabel berikut.

Tabel 4.4
Capaian Tujuan III RPK TAHUN 2024 , Sasaran dan Program Pendukungnya

No	Indikator Kinerja	Satuan	2024		Nilai Capaian
			Target	Realisasi	
3	Persentase Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan	Persen	78,33	100	128
a.	Tingkat Capaian SPM Layanan Dasar Sanitasi, Air Minum dan Perumahan	Persen	76,67	95,81	125
-	Cakupan Akses Air Minum	Persen	89	91,6	103
-	Cakupan Akses Sanitasi Layak	Persen	89	88,26	99
-	Jumlah Rumah Korban Bencana yang Ditangani	Unit	24	4	17
-	Luas Permukiman Kumuh yang Ditangani	Hektar	20	0,04	0
-	Persentase Kawasan Kumuh	Persen	8,63	3,32	162
b.	Persentase Jalan dalam kondisi Mantap	Persen	62,94	61,16	97
-	Persentase Jalan dalam Kondisi Baik	Persen	56,02	50,92	91
-	Persentase Tenaga Operator/ Teknisi/ Analisis yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi	Persen	5,55	4,10	74
-	Indeks Kelancaran Lalu Lintas	Indeks	0,53	0,53	100
c.	Persentase Kesesuaian Usulan Pemanfaatan Ruang dengan Rekomendasi yang Dikeluarkan	Persen	98,5	100	102
-	Adanya Kesesuaian Dokumen Pelaksanaan Dengan Perencanaan Penataan Ruang	Sesuai / Tidak Sesuai	Sesuai	Sesuai	100
-	Persentase Bangunan yang Terbangun	Persen	33,33	35	105
-	Persentase Gedung dan Lingkungannya yang Terpelihara	Persen	7,5	0	0
-	Persentase Kawasan Perumahan dengan Kondisi PSU yang Layak	Persen	33,33	50	150
-	Persentase Saluran Drainase Perkotaan dalam Kondisi Baik	Persen	72,1	67,1	93
-	Persentase Pengadaan Tanah yang Dikoordinasikan	Persen	100	100	100
-	Jumlah Kasus Sengketa Tanah Garapan yang Tertangani	Kasus	1	1	100
-	Persentase Tanah Terlantar dan Absentee yang Diredistribusi	Persen	67,82	0	0
-	Persentase Kawasan yang Sesuai dengan Peruntukannya	Persen	50	0	0
-	Persentase Tanah yang Bersertifikat	Persen	41,54	32,43	78
-	Adanya Aplikasi Sistem Informasi Pertanahan	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	100
-	Persentase Kasus Konflik dan Sengketa yang ditangani	Persen	60	100	167
d.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen	72,43	72,69	100
-	Indeks Kualitas Air	Persen	63,36	64	101
-	Persentase RTH yang Ditangani	Persen	12,12	4,8	40

-	Persentase Ketaatan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan	Persen	25	0	0
-	Persentase MHA yang Dibina	Persen	13	5,33	41
-	Jumlah Gampong Iklim	Gampong	6	26	433
-	Persentase Kasus Lingkungan Hidup yang Tertangani	Persen	100	0	0
-	Persentase Timbulan Sampah yang Tertangani	Persen	55	50	91
-	Tersedianya Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	100
e.	Indeks Resiko Bencana	Indeks	164	155,9	105
-	Persentase Bencana yang Tertangani	Persen	100	100	100
-	Persentase Layanan Pencegahan, Penyelamatan dan Pengendalian Kebakaran	Persen	95	100	105
-	Persentase Korban Bencana yang Ditangani	Persen	100	100	100

Melalui informasi tabel di atas, maka diketahui bahwa:

1. Tujuan Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan yang memiliki indikator Persentase Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan telah melampaui target yang telah ditentukan. Dari target 78,33 persen, capaian yang diperoleh sebesar 100 persen dengan tingkat capaian mencapai 128 persen dengan kriteria Sangat Tinggi (ST). Faktor pendukungnya adalah layanan koordinasi bersama antara PUPR dan DLHK dalam menerbitkan perencanaan infrastruktur sesuai dengan fungsi dan daya dukung lingkungan. Faktor lainnya adalah terlalu rendahnya target yang ditetapkan, karena capaian tahun 2023 capaiannya juga 100 persen. Seharusnya untuk penetapan target RPK tahun 2024 harus memperhatikan dan menyesuaikan capaian tahun sebelumnya.
2. Sasaran Meningkatnya Pemenuhan Infrastruktur Dasar yang memiliki indikator Tingkat Capaian SPM Layanan Dasar Sanitasi, Air Minum dan Perumahan telah melampaui target yang telah ditetapkan. Dari target 76,67 persen, capaian yang diperoleh sebesar 95,81 persen dengan tingkat capaian mencapai 125 persen dengan kriteria Sangat Tinggi (ST). Faktor pendorong adalah meningkatnya akses air minum dan sanitasi bagi masyarakat, serta terpenuhinya target penanganan pengadaan rumah bagi korban bencana. Faktor lainnya adalah terlalu rendahnya target yang ditetapkan, karena capaian tahun 2023 capaiannya telah mencapai 84,88 persen. Seharusnya untuk penetapan target RPK tahun 2024 harus memperhatikan dan menyesuaikan capaian tahun sebelumnya.
3. Sasaran Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Sesuai dengan Arahan Pola Ruang dan Struktur Ruang yang memiliki indikator Persentase Jalan dalam kondisi Mantap telah melampaui target yang telah ditetapkan. Dari target 60,19 persen, capaian yang diperoleh sebesar 61,16 persen dengan tingkat capaian mencapai 102 persen dengan kriteria Sangat Tinggi (ST).

4. Sasaran Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Sesuai dengan Arahana Pola Ruang dan Struktur Ruang yang memiliki indikator Persentase Jalan dalam kondisi Mantap telah melampaui target yang telah ditetapkan. Dari target 60,19 persen, capaian yang diperoleh sebesar 61,16 persen dengan tingkat capaian mencapai 102 persen dengan kriteria Sangat Tinggi (ST). Faktor pendorongnya adalah layanan konsultasi dan koordinasi bersama antara Bappeda, PUPR, dan DLHK yang mampu memberikan penjelasan kepada masyarakat yang berkonsultasi tentang pemanfaatan lahan. Setiap permintaan pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan, maka rekomendasi tidak akan diterbitkan. Sehingga sebelum mengajukan usulan, masyarakat akan berkonsultasi dan berkoordinasi dahulu. Sehingga bila tidak sesuai dengan fungsi dan peruntukan lahan, masyarakat tidak akan mengajukan usulan.
5. Sasaran Terwujudnya Pengembangan Sistem Pembangunan Ekologis yang berorientasi pada Peningkatan Kualitas dan Daya Dukung Lingkungan yang memiliki indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup telah melampaui target yang telah ditetapkan. Dari target 72,43 indeks, capaian yang diperoleh sebesar 72,69 persen dengan tingkat capaian mencapai 100 persen dengan kriteria Sangat Tinggi (ST). Faktor pendorongnya adalah layanan konsultasi dan koordinasi bersama antara Bappeda, PUPR, dan DLHK yang mampu memberikan penjelasan kepada masyarakat yang berkonsultasi tentang pemanfaatan lahan dan setiap pembangunan mewajibkan dokumen lingkungan serta terjadi peningkatan jumlah gampong iklim.
6. Sasaran Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Penurunan Resiko Bencana yang memiliki indikator Indeks Resiko Bencana telah melampaui target yang telah ditentukan. Dari target 164 indeks, capaian yang diperoleh sebesar 155,9 persen dengan tingkat capaian mencapai 105 persen dengan kriteria Sangat Tinggi (ST). Walaupun capaian yang diperoleh lebih kecil dari target, namun pengukuran indikator ini bersifat negatif yaitu semakin kecil angka yang diperoleh maka semakin baik. Hal ini sejalan dengan logika, semakin kecil resiko maka akan semakin baik. Faktor pendorongnya adalah meningkatnya kapasitas penanganan dan mitigasi bencana

4.2.4 Tujuan Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi

Tujuan ini memiliki indikator Pertumbuhan ekonomi dan memiliki target sebesar 4,8 persen pada tahun 2024. Untuk mengetahui capaian indikator tujuan ini beserta sasaran dan program yang mendukungnya dapat melihat tabel berikut.

Tabel 4.5
Capaian Tujuan IV RPK TAHUN 2024 , Sasaran dan program pendukungnya

No	Indikator Kinerja	Satuan	2024		Nilai Capaian
			Target	Realisasi	
4	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,8	4,52	94
a.	Persentase Kontribusi Sektor Pertanian,	Persen	33,89	32,88	97

Laporan Evaluasi Tahun Kedua RPK Tahun 2023-2026

	Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB				
-	Persentase Ratarata Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Pajale) dan Tanaman Perkebunan	Persen	3	2,5	84
-	Persentase Ratarata Peningkatan Populasi Ternak	Persen	3	5,95	198
-	Jumlah PDRB Sektor Pertanian	Rupiah	3,3 Trilyun	3,4 Trilyun	103
-	Peningkatan Produksi HPT	Persen	2,5	2,5	100
-	Persentase Penanggulangan Luas Serangan OPT dan DPI	Persen	100	0	0
-	Cakupan Bina Kelompok Tani	Persen	87	100	115
-	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	14.000	14.049,9	100
-	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	14.500	14.471,2	100
-	Persentase Pengendalian dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Persen	65	60	92
-	Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	Persen	27,76	19,5	70
-	Persentase Kasus Penyakit Hewan yang Tertangani	Persen	100	100	100
b.	Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB	Persen	22,15	23,46	106
-	Persentase Koperasi yang Aktif	Persen	75,47	35,29	47
-	Persentase Pengurus Koperasi yang Mendapatkan Pelatihan Koperasi	Persen	70	25,76	37
-	Persentase Jumlah UMKM yang Diberdayakan	Persen	0,50	0,5	100
-	Persentase Jumlah UMKM yang Naik Kelas	Persen	0,03	0	0
-	Persentase Jumlah KSP/USP Pola Syariah	Persen	52,83	0	0
-	Persentase Koperasi yang Mendapatkan Pengawasan	Persen	20	0	0
-	Persentase Koperasi yang Dinilai	Persen	16	0	0
-	Persentase Produk Unggulan Daerah yang Dipromosikan	Persen	55,55	0	0
-	Persentase Peningkatan Perusahaan Memiliki Perizinan dan Pendaftaran	Persen	5,26	0	0
-	Persentase Pengelolaan Sarana Perdagangan yang Berfungsi	Persen	82,93	95	115
c.	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	Persen	1,16	1,35	116
-	Persentase Pelaku Industri yang Difasilitasi	Persen	15,17	0,1	1
-	Tersedianya data industri dalam Sistem Informasi Industri Nasional	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	100
-	Jumlah Produksi Ikan Olahan	Ton	350	276,46	79
d.	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persen	9,83	9,47	96
-	Persentase Realisasi PAD	Persen	100	98,93	99
e.	Jumlah Destinasi Wisata	Destinasi	70	65	93
-	Persentase Destinasi Wisata dalam Kondisi Baik	Persen	21,43	20,63	96
-	Cakupan Peningkatan Promosi Wisata	Persen	51	50,79	99
-	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Mendapatkan Pembinaan	Persen	50	100	200
-	Persentase Pelestarian dan Pengembangan Peninggalan Budaya yang Tertangani	Persen	20	22,46	112
-	Persentase Museum yang Dikelola	Persen	100	100	100

-	Persentase Lokasi Taman Makam Pahlawan yang Dikelola	Persen	100	100	100
f.	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,665	0,6762	102
-	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang Aktif di Kecamatan	Persen	95,24	88,83	93
-	Persentase Desa yang Menerapkan Perencanaan dan Pelaporan yang Berbasis Elektronik	Persen	100	100	100
-	Adanya Fasilitas Permasalahan Gampong dan Pendataan Gampong	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	100
-	Persentase Desa yang Memiliki Administrasi Pemerintahan yang Baik	Persen	87	78,81	91
g.	Jumlah Peningkatan Investasi	Rp.	64,32 Milyar	(351) Milyar	(546)
-	Kebijakan Iklim Penanaman Modal	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	100
-	Jumlah Penambahan Pelaku Investasi	Pelaku investasi	10	0	0
-	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin	Pelaku Usaha	1.700	5.127	302
-	Jumlah Perusahaan yang Menyampaikan LKPM	Perusahaan	90	591	657
-	Tersedianya Pengolahan Data Penanaman Modal Secara Elektronik	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	100
h.	Laju Inflasi	Persen	1-3	2,79	100
-	Terkendalinya Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Ya / Tidak	Ya	Ya	100
-	Persentase UTP yang Telah Ditera	Persen	55	78	143
-	Rata-rata Capaian Kinerja Perekonomian dan Pembangunan	Persen	98	99	102

Melalui informasi tabel di atas, maka diketahui bahwa:

1. Tujuan Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang memiliki indikator Pertumbuhan Ekonomi belum mencapai target yang telah ditentukan. Dari target 4,8 persen, capaian yang diperoleh sebesar 4,52 persen dengan tingkat capaian mencapai 94 persen dengan kriteria Sangat Tinggi (ST). Faktor penghambatnya adalah melambatnya pertumbuhan sektor Pertanian, Pengadaan Air, Perdagangan Besar, serta penyediaan akomodasi dan makan minum dibandingkan tahun sebelumnya.
2. Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi di Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang memiliki indikator Persentase Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB belum mencapai target yang telah ditetapkan. Dari target 33,89 persen, capaian yang diperoleh sebesar 32,88 persen dengan tingkat capaian mencapai 97 persen dengan kriteria Sangat Tinggi (ST). Faktor penghambat capaian ini adalah tidak tercapainya target peningkatan produksi pertanian dan perikanan budidaya yang salah satu penyebabnya tidak tercapainya sarana prasarana infrastruktur yang mendukung produksi pertanian seperti jaringan irigasi dalam kondisi baik.
3. Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan dan Industri yang memiliki indikator Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan

Sepeda Motor terhadap PDRB telah melampaui target yang telah ditetapkan. Dari target 22,15 persen, capaian yang diperoleh sebesar 23,46 persen dengan tingkat capaian mencapai 106 persen dengan kriteria Sangat Tinggi (ST). Faktor pendorong adalah meningkatnya konsumsi masyarakat terhadap produk dan jasa pada sektor usaha ini. Walaupun capaian indikator ini melampaui target yang telah ditetapkan, bila dibandingkan dengan tahun lalu pertumbuhan sektor ini mengalami perlambatan. Dari pertumbuhan 2023 sebesar 7,75 persen menjadi sebesar 4,77 persen pada tahun 2024.

4. Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan dan Industri yang memiliki indikator Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB telah melampaui target yang telah ditetapkan. Dari target 22,15 persen, capaian yang diperoleh sebesar 23,46 persen dengan tingkat capaian mencapai 106 persen dengan kriteria Sangat Tinggi (ST). Faktor pendorong adalah meningkatnya konsumsi masyarakat terhadap produk dan jasa pada sektor usaha ini. Walaupun capaian indikator ini melampaui target yang telah ditetapkan, bila dibandingkan dengan tahun lalu pertumbuhan sektor ini mengalami perlambatan. Dari pertumbuhan 2023 sebesar 7,75 persen menjadi sebesar 4,77 persen pada tahun 2024.
5. Sasaran Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah yang memiliki indikator Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah belum mencapai target yang telah ditetapkan. Dari target 9,83 persen, capaian yang diperoleh sebesar 9,47 persen dengan tingkat capaian mencapai 96 persen dengan kriteria Sangat Tinggi (ST). Meskipun target tidak tercapai 100 persen, namun tingkat capaian sebesar 98 persen masih dalam kriteria sangat tinggi. Faktor yang menghambat capaian ini adalah tidak tercapainya target PAD tahun 2024 terutama pada sektor pajak daerah dan lain-lain PAD yang sah.
6. Sasaran Mengembangkan Potensi Pariwisata Daerah yang memiliki indikator Jumlah Destinasi Wisata belum mencapai target yang telah ditetapkan. Dari target 70 destinasi, capaian yang diperoleh sebesar 65 destinasi dengan tingkat capaian mencapai 93 persen dengan kriteria Sangat Tinggi (ST). Meskipun target tidak tercapai 100 persen, namun tingkat capaian sebesar 93 persen masih dalam kriteria sangat tinggi. Faktor yang menghambat capaian ini adalah kurangnya sarana dan prasarana destinasi wisata dalam kondisi yang baik, serta kurangnya promosi terhadap destinasi wisata.
7. Sasaran Meningkatnya Kemandirian Desa yang memiliki indikator Indeks Desa Membangun telah melampaui target yang telah ditetapkan. Dari target 0,665 indeks, capaian yang diperoleh sebesar 0,6762 indeks dengan tingkat capaian mencapai 102 persen dengan kriteria Sangat Tinggi (ST). Faktor pendorong adalah meningkatnya status desa di Kabupaten Bireuen ke status yang lebih baik.
8. Sasaran Meningkatnya Nilai Investasi yang memiliki indikator Jumlah Peningkatan Investasi belum mencapai target yang telah ditetapkan. Dari target 64,32 milyar rupiah, capaian yang diperoleh sebesar (351) milyar rupiah dengan tingkat capaian mencapai (546)

milyar rupiah dengan kriteria Sangat Rendah (SR). Faktor yang menghambat capaian ini adalah hasil penghitungan investasi pada tahun 2024 jauh lebih rendah dari pada tahun 2023. Hal ini terjadi karena penghitungan tahun sebelumnya memperhitungkan investasi UMK yang tidak wajib melapor, sehingga ketika tahun 2024 mayoritas UMK tidak melapor maka berdampak pada jumlah investasi lebih rendah dari tahun sebelumnya.

9. Sasaran Menjaga Stabilitas Tingkat Inflasi yang memiliki indikator Laju Inflasi telah mencapai target yang telah ditetapkan. Dari target 1-3 persen, capaian yang diperoleh sebesar 2,79 persen dengan tingkat capaian mencapai 100 persen dengan kriteria Sangat Tinggi (ST). Karena pengukuran kinerja indikator ini menggunakan prinsip *true/false*. Bila target tidak tercapai atau tidak sesuai dengan kuadran yang diinginkan maka tingkat persentasenya 0 persen. Begitupun sebaliknya, bila kuadran yang diinginkan tercapai maka tingkat persentasenya menjadi 100 persen. Faktor pendorong adalah karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya beberapa indeks harga kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 5,28 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,36 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,55 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 2,85 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,89 persen; kelompok pendidikan sebesar 3,86 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,06 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 3,43 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu kelompok kesehatan sebesar 0,04 persen; kelompok transportasi sebesar 0,17 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 2,32 persen.

4.2.5 Tujuan Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing

Tujuan ini memiliki indikator Indeks Pembangunan Manusia, memiliki target nilai indeks sebesar 73,1 pada tahun 2024. Untuk mengetahui capaian indikator tujuan ini beserta sasaran dan program yang mendukungnya dapat melihat tabel berikut.

Tabel 4.6
Capaian Tujuan V RPK TAHUN 2024 , Sasaran dan program pendukungnya

No	Indikator Kinerja	Satuan	2024		Nilai Capaian
			Target	Realisasi	
5	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	73,1	75,39	103
a.	Rata-rata lama sekolah	Tahun	9,32	9,59	103
-	APM Pendidikan Dasar 9 Tahun	Persen	88,11	91,21	104
-	Persentase Sekolah yang Menerapkan Muatan Lokal	Persen	100	0	0
-	Persentase Jumlah Guru yang Berkompetensi	Persen	69,64	50,75	73
-	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	Orang	8.193	19.441	237

b.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	15,10	14,88	99
-	Persentase Sekolah yang Menerapkan Pendidikan Berkarakter	Persen	77,87	30,84	40
c.	Angka harapan hidup	Tahun	72,46	73,82	102
-	Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	Persen	33,33	16,67	50
-	Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (BLUD)	Persen	100	89	89
-	Persentase Puskesmas dengan Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	Persen	100	100	100
-	Persentase Pemerataan SDM dan Kompetensi serta Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persen	100	88,84	89
-	Persentase Sarana Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman yang Mendapatkan Izin	Unit	442	430	97
-	Jumlah UKBM yang Aktif	UKBM	1.123	1.069	95
d.	Persentase Pemuda Berprestasi	Persen	0,86	0,8	93
-	Persentase Organisasi Pemuda yang Dibina	Persen	10	7,69	77
-	Persentase Kepramukaan Aktif	Persen	100	100	100
e.	Indeks Pembangunan Olah Raga	Indeks	0,427	0,345	81
-	Jumlah Cabang Olah Raga yang Dibina	Cabor	37	37	100
f.	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	58,27	62,34	107
-	Persentase Organisasi Wanita yang Aktif	Persen	76	91,11	120
-	Persentase Kasus Kekerasan Perempuan yang Tertangani	Persen	100	100	100
-	Persentase Kasus Kekerasan Anak yang Tertangani	Persen	100	100	100
-	Adanya Ketersediaan Sistem Informasi Keluarga Penyuluhan, Advokasi Keluarga	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	100
-	Persentase Akseptor KB	Persen	70	56,33	80
-	Persentase Desa yang Memiliki Kelompok Tribina	Persen	9	8,96	100
g.	Kabupaten Layak Anak	Level	Nindya	Pratama	33
-	Persentase Desa yang Dibina BKMT	Persen	2,79	2,79	100
-	Persentase Gampong Layak Anak	Persen	47	49,43	105
h.	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3,15	3,51	111
-	Persentase SKPK yang Melaksanakan Penelitian dan Pengembangan	Persen	100	100	100

Melalui informasi tabel di atas, maka diketahui bahwa:

1. Tujuan Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing yang memiliki indikator Indeks Pembangunan Manusia telah melampaui target yang telah ditentukan. Dari target 73,1 indeks, capaian yang diperoleh sebesar 75,39 indeks dengan tingkat capaian mencapai 103 persen dengan kriteria Sangat Tinggi (ST). Faktor pendukungnya adalah meningkatnya Angka Harapan Hidup (AHH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS), dan PDRB per kapita.
2. Sasaran Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan bagi Masyarakat yang memiliki indikator Rata-Rata lama Sekolah (RLS) telah melampaui target yang telah ditetapkan. Dari target 9,32 tahun, capaian yang diperoleh sebesar 9,59 tahun dengan tingkat capaian

- mencapai 103 persen dengan kriteria Sangat Tinggi (ST). Faktor pendorong capaian ini adalah meningkatnya akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
3. Sasaran Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan bagi Masyarakat yang memiliki indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Dari target 15,10 tahun, capaian yang diperoleh sebesar 14,88 tahun dengan tingkat capaian mencapai 99 persen dengan kriteria Sangat Tinggi (ST). Meskipun target tidak tercapai 100 persen, namun tingkat capaian sebesar 98 persen masih dalam kriteria sangat tinggi. Selain itu capaian tahun 2024 sebesar 14,88 tahun mengalami peningkatan dibandingkan capaian tahun lalu sebesar 14,87 tahun. Salah satu faktor penghambatnya adalah kurang efektifnya pendidikan non formal terutama utk warga setelah usia sekolah.
 4. Sasaran Meningkatnya Mutu dan Akses Layanan Kesehatan bagi Masyarakat yang memiliki indikator Angka Harapan Hidup (AHH) telah melampaui target yang telah ditetapkan. Dari target 72,46 tahun, capaian yang diperoleh sebesar 73.82 tahun dengan tingkat capaian mencapai 102 persen dengan kriteria Sangat Tinggi (ST). Faktor pendukung capaian ini adalah meningkatnya akses dan pelayanan bidang kesehatan.
 5. Sasaran Meningkatnya Kualitas Kepemudaan dan Olah Raga yang memiliki indikator Persentase Pemuda Berprestasi tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Dari target 0,86 persen, capaian yang diperoleh sebesar 0,8 persen dengan tingkat capaian mencapai 99 persen dengan kriteria Sangat Tinggi (ST). Meskipun target tidak tercapai 100 persen, namun tingkat capaian sebesar 98 persen masih dalam kriteria sangat tinggi.
 6. Sasaran Meningkatnya Kualitas Kepemudaan dan Olah Raga yang memiliki indikator Indeks Pembangunan Olah Raga tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Dari target 0,427 indeks, capaian yang diperoleh sebesar 0,345 indeks dengan tingkat capaian mencapai 81 persen dengan kriteria Tinggi (T). Meskipun target tidak tercapai 100 persen, namun tingkat capaian sebesar 81 persen masih dalam kriteria tinggi. Faktor penghambatnya antara lain terbatasnya sarana prasarana olahraga dan kesadaran masyarakat yang masih kurang dalam berolahraga.
 7. Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang memiliki indikator Indeks Pemberdayaan Gender telah melampaui target yang telah ditetapkan. Dari target 58,27 indeks, capaian yang diperoleh sebesar 62,34 indeks dengan tingkat capaian mencapai 107 persen dengan kriteria Sangat Tinggi (ST). Faktor pendukungnya adalah meningkatnya peran serta wanita dalam pemerintahan dan politik serta tertanganinya kasus kekerasan perempuan dan anak.
 8. Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang memiliki indikator Kabupaten Layak Anak tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Dari target level nindya, capaian yang diperoleh sebesar level pratama dengan tingkat capaian mencapai 33 persen dengan kriteria Sangat Rendah (SR). Faktor penghambatnya adalah

tidak berjalannya beberapa kebijakan dan sarana yang mendukung peningkatan level Kabupaten Layak Anak.

9. Sasaran Meningkatnya Daya Saing Daerah yang memiliki indikator Indeks Daya Saing Daerah telah melampaui target yang telah ditetapkan. Dari target 3,15 indeks, capaian yang diperoleh sebesar 3,51 indeks dengan tingkat capaian mencapai 111 persen dengan kriteria Sangat Tinggi (ST). Faktor pendukungnya adalah meningkatnya pilar-pilar pendukung penilaian IDSD yaitu pilar transparansi keuangan pemerintah, tenaga kerja yang kompetitif, dan PDRB per kapita.

4.2.6 Tujuan Menurunkan Kesenjangan Pendapatan dan Kemiskinan

Tujuan ini memiliki indikator Indeks gini, memiliki target 0,287 persen pada tahun 2024. Untuk mengetahui capaian indikator tujuan ini beserta sasaran dan program yang mendukungnya dapat melihat tabel berikut.

Tabel 4.7
Capaian Tujuan VI RPK TAHUN 2024 , Sasaran dan program pendukungnya

No	Indikator Kinerja	Satuan	2024		Nilai Capaian
			Target	Realisasi	
6	Indeks Gini	Indeks	0,287	0,258	110
a.	Persentase Penduduk Miskin	Persen	11,75	12,1	97
-	Jumlah Mustahik	Orang	8.304	5814	70
-	Persentase Tahapan Pencadangan Tanah Kawasan Transmigrasi	Persen	25	0	0
-	Persentase SP yang Aktif	Persen	42,85	42,85	100
-	Persentase KK Mandiri	Persen	47,76	38,81	81
-	Rata-rata Capaian Kinerja Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persen	100	100	100
b.	Persentase capaian SPM bidang Sosial	Persen	48	40,14	84
-	Persentase PSKS yang Difasilitasi	Persen	88,71	87,50	99
-	Persentase Warga Migran Korban Tindak Kekerasan yang Ditangani	Persen	100	22,27	22
-	Persentase Penyandang Rehabilitasi Sosial yang Ditangani	Persen	43,08	54,22	126
-	Persentase Masyarakat yang Diberikan Jaminan Sosial	Persen	84,65	61,97	73
c.	Pencapaian skor PPH	Skor	88,80	98,10	110
-	Persentase ketersediaan pangan Utama (beras)	Persen	105	103	98,1
-	Persentase KWT Aktif	Persen	77	58,33	76
-	Persentase Penanganan Desa yang Terindikasi Rawan Pangan	Persen	16	0	0
-	Persentase Pangan Segar yang Aman Dikonsumsi di Kabupaten Bireuen	Persen	89	100	112

Melalui informasi tabel di atas, maka diketahui bahwa:

1. Tujuan Menurunkan Kesenjangan Pendapatan dan Kemiskinan yang memiliki indikator Indeks Gini telah melampaui target yang telah ditentukan. Dari target 0,287 indeks, capaian yang diperoleh sebesar 0,258 indeks dengan tingkat capaian mencapai 110 persen dengan

kriteria Sangat Tinggi (ST). Walaupun capaian yang diperoleh lebih besar dari target, namun pengukuran indikator ini bersifat negatif yaitu semakin kecil angka yang diperoleh maka semakin baik. Hal ini sejalan dengan logika, semakin kecil kesenjangan maka akan semakin baik. Faktor pendorongnya adalah kondisi penduduk yang cenderung homogen di Kabupaten Bireuen.

2. Sasaran Mengurangi Angka Kemiskinan yang memiliki indikator Persentase Penduduk Miskin tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Dari target 11,75 persen, capaian yang diperoleh sebesar 12,1 persen dengan tingkat capaian mencapai 97 persen dengan kriteria Sangat Tinggi (ST). Walaupun capaian yang diperoleh lebih besar dari target, namun pengukuran indikator ini bersifat negatif yaitu semakin kecil angka yang diperoleh maka semakin baik. Hal ini sejalan dengan logika, semakin kecil kesenjangan maka akan semakin baik. Meskipun target tidak tercapai 100 persen, namun tingkat capaian sebesar 98 persen masih dalam kriteria sangat tinggi. Faktor penghambatnya antara lain kurang optimalnya pemanfaatan data P3KE, terhambatnya penyaluran zakat Baitul Mal, dan kurang berperannya analisis kebijakan dalam mengatasi permasalahan kemiskinan.
3. Sasaran Meningkatnya Perlindungan Sosial bagi Masyarakat yang memiliki indikator Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Dari target 48 persen, capaian yang diperoleh sebesar 40,14 persen dengan tingkat capaian mencapai 84 persen dengan kriteria Tinggi (T). Walaupun target tidak tercapai 100 persen, namun tingkat capaian sebesar 84 persen masih dalam kriteria kinerja tinggi.
4. Sasaran Meningkatnya Ketahanan Pangan yang memiliki indikator Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) telah melampaui target yang telah ditetapkan. Dari target 88,80 persen, capaian yang diperoleh sebesar 98,10 persen dengan tingkat capaian mencapai 110 persen dengan kriteria Sangat Tinggi (ST). Salah satu faktor pendorong adalah meningkatnya konsumsi untuk kebutuhan makanan selain karbohidrat.

4.2.7 Tujuan Menurunkan Angka Pengangguran

Tujuan ini memiliki indikator Perentase Tingkat Pengangguran Terbuka, memiliki target 3,65 persen pada tahun 2024. Untuk mengetahui capaian indikator tujuan ini beserta sasaran dan program yang mendukungnya dapat melihat tabel berikut.

Tabel 4.8
Capaian Tujuan VII RPK TAHUN 2024 , Sasaran dan program pendukungnya

No	Indikator Kinerja	Satuan	2024		Nilai Capaian
			Target	Realisasi	
7	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,65	3,93	92
a.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	68,37	67,24	98
-	Persentase Jumlah Lulusan Pelatihan yang Memiliki Kompetensi	Persen	42	68,68	164
-	Persentase Pencari Kerja yang Telah	Persen	63	60,98	97

	Ditempatkan				
-	Persentase Perusahaan yang Difasilitasi	Persen	12	12,14	101

Melalui informasi tabel di atas, maka diketahui bahwa:

1. Tujuan Menurunkan Angka Pengangguran yang memiliki indikator Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka tidak mencapai target yang telah ditentukan. Dari target 3,65 persen, capaian yang diperoleh sebesar 3,93 persen dengan tingkat capaian mencapai 92 persen dengan kriteria Sangat Tinggi (ST). Walaupun capaian yang diperoleh lebih besar dari target, namun pengukuran indikator ini bersifat negatif yaitu semakin kecil angka yang diperoleh maka semakin baik. Hal ini sejalan dengan logika, semakin kecil jumlah pengangguran maka akan semakin baik. Faktor penghambatnya adalah rendahnya penyerapan tenaga kerja dibandingkan lapangan kerja yang tersedia yang disebabkan masih lemahnya sektor industri di Kabupaten Bireuen.
2. Sasaran Meningkatnya Kesempatan Kerja yang memiliki indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Dari target 68,37 persen, capaian yang diperoleh sebesar 67,24 persen dengan tingkat capaian mencapai 98 persen dengan kriteria Sangat Tinggi (ST). Walaupun target tidak tercapai 100 persen, namun tingkat capaian sebesar 98 persen masih dalam kriteria sangat tinggi.

4.2.8 Tujuan Meningkatkan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Tujuan ini memiliki indikator Indeks Kasus Keamanan dan Ketertiban, memiliki target <1 pada tahun 2024. Untuk mengetahui capaian indikator tujuan ini beserta sasaran dan program yang mendukungnya dapat melihat tabel berikut.

Tabel 4.9
Capaian Tujuan VII RPK TAHUN 2024 , Sasaran dan program pendukungnya

No	Indikator Kinerja	Satuan	2024		Nilai Capaian
			Target	Realisasi	
8.	indeks Kasus Keamanan dan Ketertiban	Indeks	<1	1,3	0
a.	Persentase Konflik yang Diselesaikan	Persen	65	70	108
-	Persentase Peningkatan Pemahaman Terhadap Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persen	24	97	404
-	Persentase Ormas yang Mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan	Persen	70	100	143
-	Fasilitasi FKUB Kabupaten	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	100
-	Persentase Ancamaan/Deteksi Dini Konflik yang Tertangani	Persen	82	80	98
-	Persentase jumlah kasus pelanggaran Qanun yang diselesaikan	Persen	100	100	100
b.	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum	Persen	80	81,27	102

-	Persentase Peserta Partai Politik yang Memahami Mekanisme Pengelolaan Partai	Persen	87	41,67	48
---	--	--------	----	-------	----

Melalui informasi tabel di atas, maka diketahui bahwa:

1. Tujuan Meningkatkan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat yang memiliki indikator Indeks Kasus Keamanan dan Ketertiban tidak mencapai target yang telah ditentukan. Indikator ini dibentuk melalui perbandingan jumlah kasus tahun ini di bandingkan dengan jumlah kasus tahun lalu. Semakin kecil angka kasusnya, maka dianggap lebih baik karena mampu menekan jumlah kasus yang terjadi. Sehingga bila kasus tahun ini lebih sedikit dari tahun sebelumnya, maka hasil indeks akan di bawah angka 1, begitupun sebaliknya. Maka sebagai target keberhasilan, maka target indeks ini ditarget di bawah angka 1 (<1). Karena tahun ini angka rata-rata kasus keamanan dan ketertiban lebih besar dari tahun lalu yaitu 1,3; maka tingkat capaiannya menjadi 0 persen dengan kriteria kinerja Sangat Rendah (SR). Karena pengukuran kinerja indikator ini menggunakan prinsip *true/false*. Bila target tidak tercapai maka tingkat persentasenya 0 persen begitupun sebaliknya, bila tercapai maka tingkat persentasenya menjadi 100 persen. Faktor penghambat capaian indikator ini adalah ketidakmampuan dalam menekan jumlah kasus keamanan dan ketertiban umum dan kasus konflik yang jumlahnya naik bila dibandingkan dengan tahun lalu. Hal ini disebabkan oleh program dan sasaran yang mendukung tujuan ini lebih mengedepankan penindakan dan penyelesaian kasus namun kurang memperhatikan pencegahan dan sosialisasi serta pembinaan.
2. Sasaran Optimalisasi Ketentraman dan Ketertiban yang memiliki indikator Persentase Konflik yang Diselesaikan telah melampaui target yang telah ditetapkan. Dari target 65 persen, capaian yang diperoleh sebesar 70 persen dengan tingkat capaian mencapai 108 persen dengan kriteria Sangat Tinggi (ST). Salah satu faktor pendorongnya adalah kegiatan dan program yang mendukung sasaran ini lebih mengedepankan penindakan.
3. Sasaran Meningkatnya Pemahaman Masyarakat dalam Berpolitik yang memiliki indikator Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum telah melampaui target yang telah ditetapkan. Dari target 80 persen, capaian yang diperoleh sebesar 81,27 persen dengan tingkat capaian mencapai 102 persen dengan kriteria kinerja Sangat Tinggi (ST). Faktor pendukungnya adalah tingginya peran serta masyarakat untuk ikut serta dalam politik.

4.3 Hasil Evaluasi Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Kabupaten Bireuen Tahun 2024

Tabel 4.10

Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaran Urusan

No	Bidang Urusan / Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Kriteria Kinerja
A	Aspek Kesejahteraan Masyarakat					
1	Jumlah PDRB Sektor Pertanian	Rupiah	3,3 Triliun	3,4 Triliun	103	Sangat Tinggi
2	APM Pendidikan Dasar 9 Tahun	Persen	88,11	91,21	104	Sangat Tinggi

3	Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	Persen	33,33	16	50	Sangat Rendah
4	Persentase Pencari Kerja yang telah ditempatkan	Persen	63	60,98	97	Sangat Tinggi
5	Persentase PSKS yang difasilitasi	Persen	88,71	87,50	99	Sangat Tinggi
B Aspek Pelayanan Umum						
Urusan Wajib Pelayanan Dasar						
Pendidikan						
6	Persentase Sekolah yang Menerapkan Muatan Lokal	Persen	0	0	0	Sangat Rendah
7	Persentase Jumlah Guru yang Berkompetensi	Persen	69,64	50,75	73	Sedang
Kesehatan						
8	Persentase Puskesmas dengan Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
9	Persentase Sarana Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman yang Mendapatkan Izin	Unit	442	430	97	Sangat Tinggi
10	Jumlah UKBM yang Aktif	UKBM	1.123	1.069	95	Sangat Tinggi
11	Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	Persen	33,33	16,67	50	Sangat Rendah
12	Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	Persen	100	99,41	99	Sangat Tinggi
13	Persentase Pemerataan dan Peningkatan Kompetensi Serta Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persen	100	88,84	89	Tinggi
Pekerjaan Umum dan penataan Ruang						
14	Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	Persen	27,76	19,5	70	Sedang
15	Cakupan Akses Air Minum	Persen	89	88,26	99	Sangat Tinggi
16	Cakupan Akses Sanitasi Layak	Persen	89	100	112	Sangat Tinggi
17	Persentase Saluran Drainase Perkotaan dalam Kondisi Baik	Persen	72,1	67,1	93	Sangat Tinggi
18	Persentase Bangunan yang Terbangun	Persen	33,33	35	105	Sangat Tinggi
19	Persentase Gedung dan Lingkungannya yang Terpelihara	Persen	7,5	0	0	Sangat Rendah
20	Persentase Jalan dalam Kondisi Baik	Persen	56,02	50,92	91	Sangat Tinggi
21	Persentase Tenaga Operator/ Teknisi/ Analisis yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi	Persen	5,55	4,10	74	Sedang
22	Adanya Kesesuaian Dokumen Pelaksanaan dengan Perencanaan Penataan Ruang	Sesuai/ tidak sesuai	Sesuai	Sesuai	100	Sangat Tinggi
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman						
23	Jumlah Rumah Korban Bencana yang Ditangani	Unit	24	4	17	Sangat Rendah
24	Luas Permukiman Kumuh yang Ditangan	Hektar	20	0,04	0	Sangat Rendah
25	Persentase Kawasan Kumuh	Persen	8,63	3,32	162	Sangat Tinggi
26	Persentase Kawasan Perumahan dengan Kondisi PSU yang Layak	Persen	33,33	50	150	Sangat Tinggi
Ketentraman dan Ketertiban Umum						
27	Persentase Bencana yang Tertangani	Persesn	100	100	100	Sangat Tinggi
28	Persentase Layanan Pencegahan, Penyelamatan dan Pengendalian Kebakaran	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
29	Persentase Jumlah Kasus Pelanggaran Qanun yang Diselesaikan	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi

30	Persentase Peningkatan Pemahaman Terhadap Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persen	24	97	404	Sangat Tinggi
31	Persentase Peserta Partai Politik yang Memahami Mekanisme Pengelolaan Partai	Persen	87	41,67	48	Sangat Tinggi
32	Persentase Ormas yang Mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan	Persen	70	100	143	Sangat Tinggi
33	Fasilitasi FKUB Kabupaten	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	100	Sangat Tinggi
34	Persentase Ancaman/Deteksi Dini Konflik yang Tertangani	Persen	82	80	98	Sangat Tinggi
Sosial						
35	Persentase Penanganan Warga Migran Korban Tindak Kekerasan yang Ditangani	Persen	100	22,27	22	Sangat Rendah
36	Persentase Penyandang Rehabilitasi Sosial yang Ditangan	Persen	43,08	54,22	126	Sangat Tinggi
37	Persentase Masyarakat yang Diberikan Jaminan Sosial	Persen	84,65	61,97	73	Sedang
38	Persentase Korban Bencana yang Ditangani	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
39	Persentase Lokasi Taman Makam Pahlawan yang Dikelola	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar						
Tenaga Kerja						
40	Persentase Jumlah Lulusan Pelatihan yang Memiliki Kompetensi	Persen	42	68,68	164	Sangat Tinggi
41	Persentase Pencari Kerja yang Telah Ditempatkan	Persen	63	60,98	97	Sangat Tinggi
42	Persentase Perusahaan yang Difasilitasi	Persen	12	12,14	101	Sangat Tinggi
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
43	Persentase Organisasi Wanita yang Aktif	Persen	76	91,11	120	Sangat Tinggi
44	Persentase Kasus Kekerasan Perempuan yang Tertangani	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
45	Persentase Desa yang Dibina BKMT	Persen	2,79	2,79	100	Sangat Tinggi
46	Persentase Gampong Layak Anak	Persen	47	49,43	105	Sangat Tinggi
47	Persentase Kasus Kekerasan Anak yang Tertangani	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
Pangan						
48	Persentase ketersediaan pangan Utama (beras)	Persen	105	0	0	Sangat Rendah
49	Persentase KWT Aktif	Persen	77	58,33	76	Tinggi
50	Persentase Penanganan Desa yang Terindikasi Rawan Pangan	Persen	16	0	0	Sangat Rendah
51	Persentase Pangan Segar yang Aman	Persen	89	100	112	Sangat Tinggi
Pertanahan						
52	Persentase Pengadaan Tanah yang Dikoordinasikan	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
53	Jumlah Kasus Sengketa Tanah Garapan yang	Kasus	1	1	100	Sangat Tinggi
54	Persentase Tanah Terlantar dan Absentee yang Diredistribusi	Persen	67,82	0	0	Sangat Rendah
55	Persentase Kawasan yang Sesuai dengan Peruntukannya	Persen	50	0	0	Sangat Rendah
56	Persentase Tanah yang Bersertifikat	Persen	41,54	32,43	78	Tinggi
57	Adanya Aplikasi Sistem Informasi Pertanahan	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	100	Sangat Tinggi
58	Persentase Kasus Konflik dan Sengketa yang ditangani	Persen	60	100	167	Sangat Tinggi
Lingkungan Hidup						

59	Indeks Kualitas Air	Persen	63,36	64	101	Sangat Tinggi
60	Persentase RTH yang Ditangani	Persen	12,12	4,8	40	Sangat Rendah
61	Persentase Ketaatan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan	Persen	25	0	0	Sangat Rendah
62	Persentase MHA yang Dibina	Persen	13	5,33	41	Sangat Rendah
63	Jumlah Gampong Iklim	Gampong	6	26	433	Sangat Tinggi
64	Persentase Kasus Lingkungan Hidup yang Tertangani	Persen	100	0	0	Sangat Rendah
65	Persentase Timbulan Sampah yang Tertangani	Persen	55	50	91	Sangat Tinggi
66	Tersedianya Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	100	Sangat Tinggi
Kependudukan dan Catatan Sipil						
67	Cakupan Pelayanan Dokumen Kependudukan	Persen	90	94,73	108	Sangat Tinggi
68	Cakupan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen	Persen	100	78,95	79	Tinggi
69	Tersedianya Database Kependudukan	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	100	Sangat Tinggi
70	Tersedianya Profil Kependudukan	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	100	Sangat Tinggi
Pemberdayaan Masyarakat Desa						
71	Adanya Fasilitasi Permasalahan Gampong dan	Ada / Tidak Ada	Ada	0	0	Sangat Rendah
72	Persentase Desa yang Menerapkan Perencanaan dan Pelaporan yang Berbasis Elektronik	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
73	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat yang Aktif	Lembaga	5	5	100	Sangat Tinggi
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						
74	Adanya Ketersediaan Sistem Informasi Keluarga Penyuluhan, Advokasi Keluarga	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	100	Sangat Tinggi
75	Persentase Akseptor KB	Persen	70	56,33	80	Tinggi
76	Persentase Desa yang Memiliki Kelompok Tribina	Persen	9	8,96	100	Sangat Tinggi
Perhubungan						
77	Indeks Kelancaran Lalu Lintas	Indeks	0,53	0,53	100	Sangat Tinggi
Komunikasi dan Informasi						
78	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	87	97,8	112	Sangat Tinggi
79	Jumlah Aplikasi e-Government yang Digunakan SKPK	Aplikasi	80	145	181	Sangat Tinggi
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah						
80	Persentase Koperasi yang Aktif	Persen	75,47	35,29	47	Sangat Rendah
81	Persentase Pengurus Koperasi yang Mendapatkan Pelatihan Koperasi	Persen	70	25,76	37	Sangat Rendah
82	Persentase Jumlah UMKM yang Diberdayakan	Persen	0,50	0,5	100	Sangat Tinggi
83	Persentase Jumlah UMKM yang Naik Kelas	Persen	0,03	0	0	Sangat Rendah
84	Persentase Jumlah KSP/USP Pola Syariah	Persen	52,83	0	0	Sangat Rendah
85	Persentase Koperasi yang Mendapatkan Pengawasan	Persen	20	0	0	Sangat Rendah

Laporan Evaluasi Tahun Kedua RPK Tahun 2023-2026

86	Persentase Koperasi yang Dinilai	Persen	16	0	0	Sangat Rendah
Penanaman Modal						
87	Kebijakan Iklim Penanaman Modal	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	100	Sangat Tinggi
88	Jumlah Penambahan Pelaku Investasi	Pelaku investasi	10	0	0	Sangat Rendah
89	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin	Pelaku Usaha	1.700	5.127	302	Sangat Tinggi
90	Jumlah Perusahaan yang Menyampaikan LKPM	Perusahaan	90	591	657	Sangat Tinggi
91	Tersedianya Pengolahan Data Penanaman Modal Secara Elektronik	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	100	Sangat Tinggi
Pemuda dan Olahraga						
92	Persentase Organisasi Pemuda yang Dibina	Persen	10	7,69	77	Tinggi
93	Persentase Kepramukaan Aktif	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
94	Jumlah Cabang Olah Raga yang Dibina	Cabor	37	37	100	Sangat Tinggi
Statistik						
95	Tersedianya Data Statistik Sektoral	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	100	Sangat Tinggi
Persandian						
96	Persentase SKPK yang Telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah	Persen	50	92	184	Sangat Tinggi
Kebudayaan						
97	Persentase Karya Budaya yang Direvitalisasi	Persen	84,62	84,62	100	Sangat Tinggi
98	Persentase Kelompok Kesenian yang Dibina	Persen	74	74	100	Sangat Tinggi
99	Persentase Pelestarian dan Pengembangan Peninggalan Budaya yang Tertangani	Persen	20	22,46	112	Sangat Tinggi
100	Persentase Museum yang Dikelola	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
Perpustakaan						
101	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	Orang	8.193	19.441	237	Sangat Tinggi
Kearsipan						
102	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku	Persen	25	13,5	54	Rendah
Urusan Pilihan						
Pariwisata						
103	Persentase Destinasi Wisata dalam Kondisi Baik	Persen	21,43	20,63	96	Sangat Tinggi
104	Cakupan Peningkatan Promosi Wisata	Persen	51	50,79	99	Sangat Tinggi
105	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Mendapatkan Pembinaan	Persen	50	100	200	Sangat Tinggi
Pertanian						
106	Persentase Ratarata Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Pajale) dan Tanaman Perkebunan	Persen	3	2,5	84	Tinggi
107	Persentase Ratarata Peningkatan Populasi Ternak	Persen	3	5,95	198	Sangat Tinggi
108	Jumlah PDRB Sektor Pertanian	Rupiah	3,3 Trilyun	3,4 Trilyun	103	Sangat Tinggi
109	Peningkatan Produksi HPT	Persen	2,5	2,5	100	Sangat Tinggi

110	Persentase Penanggulangan Luas Serangan OPT dan DPI	Persen	100	0	0	Sangat Rendah
111	Cakupan Bina Kelompok Tani	Persen	87	100	115	Sangat Tinggi
112	Persentase Kasus Penyakit Hewan yang Tertangani	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
Perdagangan						
113	Terkendalinya Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Ya / Tidak	Ya	Ya	100	Sangat Tinggi
114	Persentase UTTP yang Telah Ditera	Persen	55	78	143	Sangat Tinggi
115	Persentase Produk Unggulan Daerah yang Dipromosikan	Persen	55,55	0	0	Sangat Rendah
116	Persentase Peningkatan Perusahaan Memiliki Perizinan dan Pendaftaran	Persen	5,26	0	0	Sangat Rendah
117	Persentase Pengelolaan Sarana Perdagangan yang Berfungsi	Persen	82,93	95	115	Sangat Tinggi
Perindustrian						
118	Persentase Pelaku Industri yang Difasilitasi	Persen	15,17	0,1	0	Sangat Rendah
119	Tersedianya data industri dalam Sistem Informasi Industri Nasional	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	100	Sangat Tinggi
Transmigrasi						
120	Persentase Tahapan Pencadangan Tanah Kawasan Transmigrasi	Persen	25	0	0	Sangat Rendah
121	Persentase SP yang Aktif	Persen	42,85	42,85	100	Sangat Tinggi
122	Persentase KK Mandiri	Persen	47,76	38,81	81	Tinggi
Perikanan						
123	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	14.000	14.049,9	100	Sangat Tinggi
124	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	14.500	14.471,2	100	Sangat Tinggi
125	Persentase Pengendalian dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Persen	65	60	92	Sangat Tinggi
126	Jumlah Produksi Ikan Olahan	Ton	350	276,46	79	Tinggi
Urusan Pendukung						
Administrasi Pemerintahan						
Sekretariat Daerah						
127	Rata-rata Capaian Kinerja Perekonomian dan Pembangunan	Persen	98	99	102	Sangat Tinggi
128	Rata-rata Capaian Kinerja Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
Sekretariat DPRK						
129	Terintegrasi Program-program DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada / Tidak ada	Ada	Ada	100	Sangat Tinggi
Kewilayahan						
Kecamatan						
Kecamatan Samalanga						
130	Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat yang Dilaksanakan	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
131	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang Aktif di Kecamatan	Persen	97	80,43	83	Tinggi
132	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintah Umum	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi

133	Persentase Desa yang Menerapkan Perencanaan dan Pelaporan yang Berbasis Elektronik	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
Kecamatan Simpang Mamplam						
134	Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat yang Dilaksanakan	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
135	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang Aktif di Kecamatan	Persen	75	85,37	114	Sangat Tinggi
136	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintah Umum	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
137	Persentase Desa yang Menerapkan Perencanaan dan Pelaporan yang Berbasis Elektronik	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
Kecamatan Pandrah						
138	Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat yang Dilaksanakan	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
139	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang Aktif di Kecamatan	Persen	100	78,95	79	Tinggi
140	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintah Umum	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
141	Persentase Desa yang Menerapkan Perencanaan dan Pelaporan yang Berbasis Elektronik	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
Kecamatan Jeunib						
142	Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat yang Dilaksanakan	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
143	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang Aktif di Kecamatan	Persen	92	67,44	73	Sedang
144	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintah Umum	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
145	Persentase Desa yang Menerapkan Perencanaan dan Pelaporan yang Berbasis Elektronik	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
Kecamatan Peulimbang						
147	Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat yang Dilaksanakan	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
148	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang Aktif di Kecamatan	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
149	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintah Umum	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
150	Persentase Desa yang Menerapkan Perencanaan dan Pelaporan yang Berbasis Elektronik	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
Kecamatan Peudada						
151	Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat yang Dilaksanakan	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
152	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang Aktif di Kecamatan	Persen	89	78,85	89	Tinggi
153	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintah Umum	Persen	100	33	33	Sangat Rendah
154	Persentase Desa yang Menerapkan Perencanaan dan Pelaporan yang Berbasis Elektronik	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
Kecamatan Jeumpa						
155	Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat yang Dilaksanakan	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
156	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang Aktif di Kecamatan	Persen	90	85,71	95	Sangat Tinggi
157	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintah Umum	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi

158	Persentase Desa yang Menerapkan Perencanaan dan Pelaporan yang Berbasis Elektronik	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
Kecamatan Kota Juang						
159	Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat yang Dilaksanakan	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
160	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang Aktif di Kecamatan	Persen	96	85,96	90	Tinggi
161	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintah Umum	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
162	Persentase Desa yang Menerapkan Perencanaan dan Pelaporan yang Berbasis Elektronik	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
Kecamatan Kuala						
163	Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat yang Dilaksanakan	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
164	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang Aktif di Kecamatan	Persen	90	100	111	Sangat Tinggi
165	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintah Umum	Persen	100	33	33	Sangat Rendah
166	Persentase Desa yang Menerapkan Perencanaan dan Pelaporan yang Berbasis Elektronik	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
Kecamatan Juli						
167	Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat yang Dilaksanakan	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
168	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang Aktif di Kecamatan	Persen	82	88,89	109	Sangat Tinggi
169	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintah Umum	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
170	Persentase Desa yang Menerapkan Perencanaan dan Pelaporan yang Berbasis Elektronik	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
Kecamatan Peusangan						
171	Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat yang Dilaksanakan	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
172	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang Aktif di Kecamatan	Persen	92	97,10	106	Sangat Tinggi
173	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintah Umum	Persen	100	33	33	Sangat Rendah
174	Persentase Desa yang Menerapkan Perencanaan dan Pelaporan yang Berbasis Elektronik	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
Kecamatan Jangka						
175	Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat yang Dilaksanakan	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
176	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang Aktif di Kecamatan	Persen	100	93,48	93	Sangat Tinggi
177	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintah Umum	Persen	100	33	33	Sangat Rendah
178	Persentase Desa yang Menerapkan Perencanaan dan Pelaporan yang Berbasis Elektronik	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
Kecamatan Peusangan Siblah Krueng						
179	Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat yang Dilaksanakan	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
180	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang Aktif di Kecamatan	Persen	92	95,24	104	Sangat Tinggi
181	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintah Umum	Persen	100	33	33	Sangat Rendah

182	Persentase Desa yang Menerapkan Perencanaan dan Pelaporan yang Berbasis Elektronik	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
Kecamatan Peusangan Selatan						
183	Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat yang Dilaksanakan	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
184	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang Aktif di Kecamatan	Persen	100	95,24	95	Sangat Tinggi
185	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintah Umum	Persen	100	50	50	Sangat Rendah
186	Persentase Desa yang Menerapkan Perencanaan dan Pelaporan yang Berbasis Elektronik	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
Kecamatan Kutablang						
187	Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat yang Dilaksanakan	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
188	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang Aktif di Kecamatan	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
189	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintah Umum	Persen	100	50	50	Sangat Rendah
190	Persentase Desa yang Menerapkan Perencanaan dan Pelaporan yang Berbasis Elektronik	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
Kecamatan Makmur						
191	Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat yang Dilaksanakan	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
192	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang Aktif di Kecamatan	Persen	100	88,9	89	Tinggi
193	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintah Umum	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
194	Persentase Desa yang Menerapkan Perencanaan dan Pelaporan yang Berbasis Elektronik	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
Kecamatan Gandapura						
195	Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat yang Dilaksanakan	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
196	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang Aktif di Kecamatan	Persen	90	87,5	97	Sangat Tinggi
197	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintah Umum	Persen	100	50	100	Sangat Rendah
198	Persentase Desa yang Menerapkan Perencanaan dan Pelaporan yang Berbasis Elektronik	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
Pengawasan						
Inspektorat						
199	Persentase Tindak Lanjut Temuan	Persen	90	84,5	94	Sangat Tinggi
200	Persentase Perangkat Daerah yang Mendapat Pendampingan	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
Penunjang						
Perencanaan						
201	Tersedianya Dokumen Perencanaan yang Ditetapkan dengan Perda/Perkada	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	100	Sangat Tinggi
202	Persentase Konsistensi Program Antara RPJM dengan APBK	Persen	100	93,89	94	Sangat Tinggi
Keuangan						
203	Persentase Realisasi Kinerja Keuangan Daerah	Persen	96	95,8	100	Sangat Tinggi
204	Persentase Peningkatan Manajemen Aset Daerah	Persen	100	80	80	Tinggi

205	Persentase Realisasi PAD	Persen	100	98,93	99	Sangat Tinggi
Penelitian dan Pengembangan						
206	Persentase SKPK yang Melaksanakan Penelitian dan Pengembangan	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
Kepegawaian						
207	Persentase Tata Kelola Kepegawaian Sesuai Manajemen ASN	Persen	96	92,18	96	Sangat Tinggi
Pendidikan dan Pelatihan						
208	Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	Persen	34,15	31,23	91	Sangat Tinggi
Pemerintahan Umum						
Kesatuan Bangsa						
209	Persentase Peningkatan Pemahaman Terhadap Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persen	24	97	404	Sangat Tinggi
210	Persentase Ormas yang Mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan	Persen	70	100	143	Sangat Tinggi
211	Fasilitasi FKUB Kabupaten	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	100	Sangat Tinggi
212	Persentase Ancaman/Deteksi Dini Konflik yang Tertangani	Persen	82	80	98	Sangat Tinggi
213	Persentase Peserta Partai Politik yang Memahami Mekanisme Pengelolaan Partai	Persen	87	41,67	48	Sangat Rendah
Kekhususan						
Kekhususan Aceh						
214	Jumlah Gampong yang mengadakan pengajian rutin	Gampong	609	609	100	Sangat Tinggi
215	Persentase sidang yang menghasilkan keputusan	Persen	50	100	200	Sangat Tinggi
216	Jumlah dayah yang Terakreditasi	Dayah	164	190	116	Sangat Tinggi
217	Persentase Sekolah yang Menerapkan Pendidikan Berkarakter	Persen	77,87	30,84	40	Sangat Rendah
218	Jumlah Mustahik	Orang	8.304	5814	70	Sedang

4.4 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Indikator SPM tahun 2024

4.4.1 Capaian SPM Untuk Bidang Pendidikan

Standar Pelayanan Minimal (SPM) disusun dalam rangka melaporkan perkembangan penyelenggaraan Standar pelayanan minimal dengan 6 (enam) urusan wajib pemerintah. Hal ini sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pasal 12 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dan sosial.

Keberhasilan pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bireuen harus memerlukan dukungan dan perhatian dari semua pihak, sehingga diharapkan target Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan secara nasional dapat tercapai sebagaimana batas waktu yang telah ditetapkan pada masing-masing kementerian. Dalam upaya tersebut telah dilakukan melalui pelaksanaan program dan kegiatan melalui dokumen Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kabupaten Bireuen serta dokumen Rencana Strategis perangkat daerah pengampu SPM. Permasalahan yang muncul dalam penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal di Kabupaten Bireuen adalah sebagai berikut:

Masih kurangnya pemahaman perangkat daerah terhadap Standar Pelayanan Minimal. Hal ini berimbas pada tidak sepenuhnya program dan kegiatan dalam rangka pencapaian SPM dapat termuat dalam dokumen perencanaan Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah; Penerapan SPM perlu didukung oleh Pemerintah Daerah baik dari sisi kebijakan (regulasi/peraturan) dan dukungan anggaran terutama untuk koordinasi dan pelaporan (penyediaan data); Ketersediaan data belum optimal yang dipengaruhi oleh kesulitan mendapatkan data/laporan SPM dari perangkat daerah terkait. Akibatnya terjadi keterlambatan dalam analisis data dan pelaporan tidak tepat waktu sesuai yang diharapkan.

Standar Pelayanan Minimal untuk bidang pendidikan, peraturan yang dijadikan pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal adalah Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Pemerintah Kabupaten Bireuen mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 1 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Bireuen. Oleh karena itu dalam merencanakan percepatan penerapan pelayanan minimal pendidikan dasar di Kabupaten Bireuen, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen selalu berpedoman pada peraturan-peraturan tersebut. Baik dalam penyusunan maupun dalam pelaksanaan program pendidikan dasar di Kabupaten Bireuen.

Dalam melakukan pengukuran pencapaian SPM tersebut, Pemerintah Kabupaten Bireuen menggunakan aplikasi pelaporan SPM kemendagri. Berbagai data dasar yang terdapat ditingkat satuan pendidikan diinput ke dalam aplikasi ini. Setelah data-data yang terkait indikator SPM tersebut diinput, diolah serta diinterpretasikan (ditafsirkan), maka akan dapat diperoleh hasil tingkat pencapaian SPM, khususnya yang terkait dengan 14 indikator yang menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten dan 13 indikator yang menjadi tanggung jawab tingkat satuan pendidikan.

Tabel 4.11

Realisasi Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2024 Kabupaten Bireuen

No.	Uraian	Satuan	Target	Realisasi
I	Indikator SPM Bidang Pendidikan			
1	Pendidikan Dasar			
	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	%	100	100
2	Pendidikan Kesetaraan			
	Jumlah Warga Negara Usia 7 -18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	100	100
3	Pendidikan Anak Usia Dini			

Jumlah Warga Negara Usia 5- 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	%	100	32,63
---	---	-----	-------

Capaian tertinggi indikator SPM bidang Pendidikan tahun 2024 pada Pendidikan Dasar sebesar 80 persen dengan jumlah yang terlayani sebanyak 8.705 orang dari jumlah usia anak sekolah dasar sebanyak 70.498 orang. Kemudian di susul SPM bidang pendidikan Anak Usia Dini sebesar 37,36 persen dengan jumlah terlayani 9.988 orang dari jumlah usia anak sekolah 19.294 orang. Sedang SPM yang paling rendah adalah pendidikan kesetaraan sebesar 12,18 persen dengan jumlah terlayani 3.891 orang dari jumlah usia sekolah 9.942 orang.

4.4.2 Capaian SPM Untuk Bidang Kesehatan

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan kesehatan dasar yang berhak di terima setiap warga masyarakat di Kabupaten Bireuen secara minimal. SPM merupakan hal minimal yang harus di laksanakan oleh Pemda untuk warganya serta merupakan tolak ukur kinerja pelayanan yang diselenggarakan di Kabupaten Bireuen. SPM bidang kesehatan diharapkan pelayanan kesehatan yang paling mendasar dan esensial dapat dipenuhi, maka target SPM adalah 100 persen setiap tahunnya.

Kabupaten Bireuen tahun 2024 memiliki 20 unit Puskesmas yang merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat pertama, upaya pelayanan kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi tingginya di wilayah Kabupaten Bireuen.

Tabel 4.12
Realisasi Pencapaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2024 Kabupaten Bireuen

No.	Uraian	Satuan	Target	Realisasi
II	Indikator SPM Bidang Kesehatan			
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			
	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan Kesehatan	%	100	85,57
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			
	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan Kesehatan	%	100	75,43
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			
	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	73,12
4	Pelayanan kesehatan balita			
	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan Kesehatan	%	100	66,04
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar			
	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan Kesehatan	%	100	100
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif			

No.	Uraian	Satuan	Target	Realisasi
	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan Kesehatan	%	100	90,20
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut			
	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan Kesehatan	%	100	93,75
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi			
	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan Kesehatan	%	100	86,03
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus			
	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan Kesehatan	%	100	96,26
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat			
	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani Kesehatan	%	100	99,88
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosi			
	Jumlah Warga Negara terduga tuberculosi yang mendapatkan layanan Kesehatan	%	100	99,16
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)			
	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan Kesehatan	%	100	100

Capaian tertinggi pada SPM Pelayanan Kesehatan pada tahun 2024 pada terdapat satu layanan yang capaiannya sudah diatas 50 persen dan sebelas pelayanan dengan capaian dibawah 50 persen. Realisasi SPM Kesehatan yang masih rendah umumnya disebabkan masih rendahnya jumlah total yang terlayani dibandingkan jumlah total yang harus dilayani.

4.4.3 Capaian SPM Untuk Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terhadap target nasional dan mengetahui kendala atau permasalahan yang dihadapi SKPK penanggung jawab SPM.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pekerjaan Umum mencakup SPM Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 /PRT/M/ 2018. Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Pasal 4 ayat (2) huruf a pada SPM Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah kabupaten/kota terdiri atas: Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik.

Tabel 4.13
Realisasi Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Tahun 2024 Kabupaten Bireuen

No.	Uraian	Satuan	Target	Realisasi
III	Indikator SPM Bidang Pekerjaan Umum			
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari			
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	%	100	91,62
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik			
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	%	100	100

Realisasi SPM Bidang Pekerjaan Umum pada tahun 2024 sudah hamper mencapai 100 persen. Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari sebesar 91,62 persen dan Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik mencapai 100 persen.

4.4.4 Capaian SPM Untuk Bidang Perumahan Rakyat

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perumahan Rakyat mencakup SPM Perumahan Rakyat Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 /PRT/M/ 2018. Jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Pasal 9 ayat (2) huruf a pada SPM Perumahan Rakyat Pemerintah Daerah kabupaten/kota terdiri atas: Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Tabel 4.14
Realisasi Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2024 Kabupaten Bireuen

No.	Uraian	Satuan	Target	Realisasi
IV	Indikator SPM Bidang Perumahan Rakyat			
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kab/kota			
	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100	100
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota			

No.	Uraian	Satuan	Target	Realisasi
	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	0	0,00

4.4.5 Capaian SPM Untuk Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Standar Teknis Pelayanan Sub Urusan Trantibum adalah ketentuan terkait mutu pelayanan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dalam menjamin pemenuhan kebutuhan dasar layanan sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum yang berhak diperoleh setiap warga negara Indonesia yang terkena dampak penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Tabel 4.15

Realisasi Pencapaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2024 Kabupaten Bireuen

No.	Uraian	Satuan	Target	Realisasi
V	Indikator SPM Bidang Keamanan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum Provinsi			
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi			
2	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum			
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	%	100	93,75
3	Pelayanan informasi rawan bencana			
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100
4	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana			
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana			
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	0	0
6	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran			
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	%	100	100

4.4.6 Capaian SPM Untuk Bidang Sosial

Jenis Pelayanan Dasar SPM Bidang Sosial bagi Pemerintah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut.

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti
2. Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti

Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

Tabel 4.16
Realisasi Pencapaian SPM Bidang Sosial Tahun 2024 Kabupaten Bireuen

No.	Uraian	Satuan	Target	Realisasi
VI	Indikator SPM Bidang Sosial			
1	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	89,69
	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti			
2	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	100
	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti			
3	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	100
	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti			
4	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	%	100	65,63
	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota			
5	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	%	100	100

Capaian SPM tertinggi bidang sosial Kabupaten Bireuen triwulan I tahun 2025 dari 5 indikator, dua indikator pelayanan SPM bidang sosial diatas 50 persen dan tiga indikator masih dibawah 50 persen.

4.5 Hasil Evaluasi Tingkat Konsistensi Antar Dokumen RPK, RKPK, dan APBK

Untuk menghitung konsistensi antar dokumen perencanaan, maka harus diketahui jumlah program yang dapat ditampung oleh masing-masing dokumen.

- a. Konsistensi antara dokumen RPK dan RKPK

Dalam dokumen RPK terdapat 262 program yang direncanakan pada tahun 2024, namun yang dapat ditampung dalam dokumen RKPK sebanyak 246 program. Hal ini menyebabkan tingkat konsistensi dokumen RPK dan RKPK sebesar 93,89 persen.

b. Konsistensi antara dokumen RKPK dan APBK

Dalam dokumen RKPK terdapat 246 program yang direncanakan pada tahun 2023, namun yang dapat ditampung dalam dokumen APBK sebanyak 246 program. Hal ini menyebabkan tingkat konsistensi dokumen RKPK dan APBK sebesar 100 persen.

c. Konsistensi antara dokumen RPK dan APBK

Dalam dokumen RPK terdapat 262 program yang direncanakan pada tahun 2023, namun yang dapat ditampung dalam dokumen APBK sebanyak 246 program. Hal ini menyebabkan tingkat konsistensi dokumen RPK dan APBK sebesar 93,89 persen.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Dari 262 Program RPK yang dapat ditampung dalam RKPK tahun 2024 sebanyak 246 program, ini berarti ada 16 program RPK yang belum dapat ditampung dalam RKPK. Sehingga kemampuan dokumen Perubahan RKPK tahun 2024 mampu menampung program dalam dokumen RPK sebesar 93,89 persen. Hal ini bermakna tingkat konsistensi antara dokumen RKPK dan RPK sebesar 93,89 persen.
2. Dari 246 Program Perubahan RKPK yang dapat ditampung dalam APBK tahun 2024 sebanyak 246 program, ini berarti semua program Perubahan RKPK dapat ditampung dalam APBK. Sehingga kemampuan dokumen APBK tahun 2024 dapat menampung program dalam dokumen RKPK sebesar 100 persen. Hal ini bermakna tingkat konsistensi antara dokumen APBK dan Perubahan RKPK sebesar 100 persen.
3. Dari 262 program RPK tahun 2024 yang ditampung dalam APBK tahun 2024 sebanyak 247 program, ini berarti ada 14 program RPK tahun 2023 yang tidak tertampung dalam APBK tahun 2023. Sehingga kemampuan tampung dokumen APBK tahun 2023 mampu menampung program dalam dokumen RPK sebesar 94,64 persen.
4. Masih terdapat inkonsistensi antara indikator dan target perencanaan dengan indikator dan target pelaporan.
5. Masih terdapat program yang belum menggambarkan pencapaian kinerja pada bidang tertentu.
6. Masih banyak indikator yang terdapat pada LPPD, SDG,s, maupun indikator penyusun RB yang belum ditampung dalam dokumen perencanaan RPD maupun RKPK karena keterbatasan jumlah program.
7. Terdapat target kegiatan yang tidak sinkron dengan target sub kegiatan yang akan menyebabkan capaian yang melebihi target (melebihi 100 persen) maupun tidak mencapai target (kurang dari 100 persen) yang di akibatkan kesalahan dalam menghitung perencanaan target kegiatan

5.2. Saran

1. Melakukan pemilahan terhadap program-program dan belanja yang berdampak efektif dan efisien kepada pencapaian sasaran serta tujuan.
2. Pemerintah Daerah agar dapat meningkatkan pendapatan dari sumber Pendapatan Asli Daerah dan tidak terlalu bergantung dari transfer pusat agar dapat membiayai belanja-belanja yang dibutuhkan agar Indikator Kinerja Utama Daerah dapat tercapai.
3. Diharapkan pada anggaran perubahan, konsistensi antar dokumen perencanaan dapat meningkat dengan cara menampung seluruh program yang ada dalam dokumen RPK ke dalam dokumen Perubahan RKPK dan Perubahan APBK.
4. Memperkuat asistensi dan supervisi renja maupun renstra agar tidak terjadi inkonsistensi antara dokumen perencanaan dan pelaporan.

5. Pada saat dokumen perencanaan perubahan harus dilakukan asistensi yang intensif agar indikator yang digunakan selaras dengan dokumen RPK, Renstra OPD, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021.
6. Ketika menyusun perencanaan perubahan, maka indikator yang sudah menunjukkan hasilnya namun belum mencapai target harus menjadi perhatian utama. Sedangkan untuk indikator yang telah mencapai target bahkan melebihi target yang telah ditentukan tidak diprioritaskan lagi dalam perubahan.
7. Mengarahkan SKPK untuk mengadakan survey dan pencarian data yang dibutuhkan dalam penetapan target dan pencapaian kinerja.
8. Mempersiapkan SKPK agar dapat melakukan evaluasi RKPK secara mandiri, agar dapat dinilai oleh Bappeda.
9. Untuk program yang belum terealisasi, maka dijadikan sebagai program prioritas untuk dilaksanakan pada tahun berikutnya.
10. Untuk indikator yang belum menggambarkan kinerja pada bidang tertentu harap diadakan penyesuaian pada saat perubahan baik tingkat hasil (*outcome*) maupun dampak (*impact*).
11. Untuk dapat menampung indikator-indikator yang ditetapkan dalam LPPD, SDG's, dan RB maka perlu disusun lebih dari 1 indikator pada program-program tertentu atau pada sasaran renstra yang dapat dilaksanakan apabila terjadi perubahan RPJM serta renstra.

FORMULIR E.78
Evaluasi Terhadap Hasil RPJMD
Kabupaten Bireuen
Periode Pelaksanaan : Tahun 2023-2026

No	Tujuan / Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian pada awal perencanaan	Target pada akhir tahun perencanaan		Target RPK Tahun ke-				Realisasi RPK Tahun ke-				Tingkat capaian RPK Tahun ke-				Capaian pada akhir tahun perencanaan	Rasio capaian akhir		
					6	7	I		II		I		II		I		II					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 8*9+10*11	14 = 13/6*100									
1	Memperkuat Pelaksanaan Syariah dalam Tatahan Kehidupan Masyarakat		Indeks Penerapan Syariah Islam	76 Persen	95,00	100.228.821.461	87,00	23.558.600.000	90,00	22.084.157.950	97,32	19.523.565.674	76,33	28.490.118.917	111,86	83	85	129	85,00	48.013.684.591	89	48
1.1	Meningkatnya Nilai-Nilai Syariah Islam Dalam Tatahan Kehidupan Masyarakat		Tingkat Pelanggaran Syariah Islam yang Diselesaikan	100 Persen	100	41.472.464.961	100	9.042.600.000	100	10.239.157.950	100	7.340.393.259	100	6.601.778.730	100	81	100	64	100	13.942.171.989	100	34
		Program Syariah Islam Aceh	Jumlah Gampong yang mengadakan pengajian rutin	609 Gampong	609	39.056.714.961	609	8.628.000.000	609	9.479.957.950	560	7.099.478.879	609	5.332.762.730	91,95	82,28	100	56	560	12.432.241.609	91,95	31,83
		Program Sekretariat Majelis Pemusyawaratan Ulama (Majelis Ulama)	Persentase Sidang yang Menghasilkan Keputusan	40 Persen	60	2.415.750.000	45	414.600.000	50	759.200.000	100	240.914.380	100	1.269.016.000	222,2	58,11	200	167	100	1.509.930.380	166,67	62,50
1.2	Meningkatnya Mutu Pendidikan Keislaman		Persentase Tipe Dayah yang Naik Kelas	26,1 Persen	51,3	48.237.000.000	36,5	11.792.000.000	41,3	11.845.000.000	17,37	9.681.724.600	12,17	17.541.368.195	47,58	82,10	29	148	15	27.223.092.795	29,51	56,44
		Program Pendidikan Dayah	Jumlah Dayah Terakreditasi	156 Dayah	167	48.237.000.000	161	11.792.000.000	164	11.845.000.000	190	9.681.724.600	190	17.541.368.195	118,0	82,10	116	148	190	27.223.092.795	113,77	56,44
1.3	Meningkatnya Tatahan Budaya dan Adat Istiadat yang Islami		Jumlah Kearifan Lokal yang Dilestarikan	5 Adat	18	10.519.356.500	18	2.724.000.000	18	2.501.447.815	18	2.501.447.815	18	4.346.971.992	100	92	100	#DIV/0!	18	6.848.419.807	100,00	65,10
		Program Sekretariat Majelis Adat Aceh	Jumlah Urusan Pemerintah yang Menggunakan Kearifan Lokal	5 urusan	8	2.153.424.000	8	464.000.000	8	510.400.000	8	229.021.850	8	104.999.330	100,0	49,36	100	21	8	334.021.180	100,00	15,51
		Program Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat yang Aktif	Jumlah Lembaga Masyarakat, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat yang Aktif	5 Lembaga	5	5.222.492.500	5	1.580.000.000	5	1.428.000.000	5	1.483.684.665	5	2.853.233.290	100,0	93,90	100	200	5	4.336.917.955	100,00	83,04
		Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Karya Budaya yang Direvitalisasi	61,54 Persen	100	2.351.455.500	76,92	496.250.000	84,62	578.812.500	82	359.920.800	84,62	889.999.700	106,6	72,53	100	154	82	1.249.920.500	82,00	53,16
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Kelompok Kesenian yang Dibina	71 Persen	77	791.984.500	73	183.750.000	74	192.937.500	74	428.820.500	74	498.739.672	101,4	233,37	100	258	74	927.560.172	96,10	117,12
Rata-rata capaian kinerja															109	93	105	#####	98	57		
Predikat Kinerja															ST	ST	ST	#####	ST	R		
* Faktor Pendorong :																						
* Faktor Penghambat :																						
2	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel		Indeks Reformasi Birokrasi	CC	B		CC		B		B				133							
2.1	Terwujudnya Pemerintahan yang Baik dan Bersih Serta Bertanggung Jawab		Opini BPK	WTP	WTP	2.233.378.759.291	WTP	557.974.264.732	WTP	559.874.010.902	WTP	565.555.212.629	WTP	567.853.932.451	100	101	100	101	100	1.132.751.399.104	100	51
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Terintegrasi Program-program DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen	Ada	Ada	46.248.073.000	Ada	10.153.000.000	Ada	11.968.300.000	Ada	11.903.341.360	Ada	6.847.824.889	100	117	100	57	Ada	18.751.166.249	100,00	40,54
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Keuangan Daerah	94,75 Persen	97	2.187.130.686.291	95,5	547.821.264.732	96	547.370.710.902	94,98	553.651.871.269	95,8	560.348.361.586	99	101	100	102	94,98	1.114.000.232.855	97,92	50,93
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Peningkatan Manajemen Aset Daerah	99,9 Persen	100	2.140.000.000	100	535.000.000	100	535.000.000	95,8	799.171.845	80	657.745.976	96	149	80	123	95,80	1.456.917.821	95,80	68,08
2.2	Meningkatnya Tingkat Maturitas SPIP		Level Maturitas SPIP	2 Level	3	10.761.373.000	2	2.320.000.000	2	2.550.900.000	3	1.677.359.128	3	1.867.951.668	150	72	150	73	3,00	3.545.310.796	100,00	32,94
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Tindak Lanjut Pemenuhan	84,71 Persen	90	7.767.928.000	90	1.675.000.000	90	1.841.400.000	94	1.269.749.320	84,5	1.381.026.668	104	76	94	75	94,00	2.650.775.988	104,44	34,12
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Perangkat Daerah yang Mendapat Bantuan	100 Persen	100	2.993.445.000	100	645.000.000	100	709.500.000	100	407.609.808	100	486.925.000	100	63	100	69	100,00	894.534.808	100,00	29,88
2.3	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Berkualitas		Tingkat Akuntabilitas Kinerja	CC	BB	3.805.528.761.795	B	917.344.300.748	B	933.866.059.210	CC	859.022.241.962	B	965.154.593.924	75	94	100	103	75,00	1.824.176.835.886	75,00	47,93
		Program Pendaftaran Benduduk	Cakupan Pelayanan Dokumen Kependudukan	89,16 Persen	90,6	557.000.000	90	130.000.000	90	137.000.000	90,92	119.998.930	94,73	136.983.615	101	92	105	100	90,92	256.982.545	100,35	46,14
		Program Pencatatan Sipil	Cakupan Pencatatan, Penatausahaan dan Pemeliharaan Dokumen	68,75 Persen	100	612.000.000	89,5	135.000.000	100	150.000.000	76,81	124.129.160	78,95	161.808.966	86	92	79	108	76,81	285.938.126	76,81	46,72
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Tersedianya Database Kependudukan	Ada	Ada	631.460.000	Ada	145.000.000	Ada	154.500.000	Ada	119.875.950	Ada	154.490.750	100	83	100	100	Ada	274.366.700	100,00	43,45
		Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Tersedianya Profil Kependudukan	Ada	Ada	132.000.000	Ada	30.000.000	Ada	32.000.000	Ada	29.933.000	Ada	31.913.140	100	100	100	100	Ada	61.846.140	100,00	46,85

No	Tujuan / Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian pada awal perencanaan	Target pada akhir tahun perencanaan	Target RPK Tahun ke-				Realisasi RPK Tahun ke-				Tingkat capaian RPK Tahun ke-				Capaian pada akhir tahun perencanaan		Rasio capaian akhir									
						I		II		I		II		I		II		13 = 8*9+10*11			14 = 13/6*100								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22								
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	100 Persen	100	3.628.600.000	100	805.000.000	100	875.500.000	100	910.879.745	100	858.655.680	100	113	100	98	100,00	1.769.535.425	100,00	48,77							
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintah Umum	100 Persen	100	1.946.500.000	100	425.000.000	100	467.500.000	100	910.745.210	69	410.177.185	100	214	69	88	100,00	1.320.922.395	100,00	67,86							
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100	3.798.021.201.795	100	915.674.300.748	100	932.049.559.210	99,20	856.806.679.967	190,7	963.400.564.588	99	94	191	103	99,20	1.820.207.244.555	99,20	47,93							
2.4	Meningkatnya Tata Kelola Kelembagaan Layanan Administrasi Pemerintahan serta Layanan Publik Berbasis Elektronik		Indeks SPBE	2,06 Indeks	2,47	39.631.420.075	2,14	8.691.700.000	2,26	9.571.370.000	2,12	4.427.324.985	2,32	2.874.321.377	99	51	103	30	2	7.301.646.362	85,83	18							
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Jumlah Aplikasi e-Government yang Digunakan SKPD	75 Aplikasi	84	1.086.075.000	78	300.000.000	80	130.000.000	153	224.236.251	145	67.593.770	196	75	181	52	153,00	291.830.021	182,14	26,87							
		Program Informasi dan Komunikasi Publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	85 Peringkat	90	2.390.000.000	86	700.000.000	87	440.000.000	97,43	397.618.330	97,8	178.030.510	113	57	112	40	97,43	575.648.840	108,26	24,09							
		Program Penyelenggaraan Statistik Seklral	Tersedianya Data Statistik Seklral	Ada	Ada	990.000.000	Ada	200.000.000	Ada	230.000.000	Ada	61.529.825	Ada	41.578.973	100	31	100	18	Ada	103.108.798	100,00	10,42							
		Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan yang Ditetapkan dengan Keputusan	Ada	Ada	7.547.565.500	Ada	1.465.500.000	Ada	2.120.050.000	Ada	1.212.372.139	Ada	797.869.890	100	83	100	38	Ada	2.010.242.029	100,00	26,63							
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Konsistensi Program Antara RPJM Daerah	99,04 Persen	100	7.904.624.000	100	1.729.000.000	100	1.864.400.000	98,47	1.185.269.379	93,89	752.904.217	98	69	94	40	98,47	1.938.173.596	98,47	24,52							
		Program Pengelolaan Arsip	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku	13,50 Persen	33	400.000.000	21,2	100.000.000	25	100.000.000	17	124.690.400	13,5	122.173.730	80	125	54	122	17,00	246.864.130	51,99	61,72							
		Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase SKPK yang Telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat	4 Persen	96	858.585.000	27	185.000.000	50	203.500.000	39	74.987.070	92	45.562.430	144	41	184	22	39,00	120.549.500	40,63	14,04							
		Program Kepegawaian Daerah	Persentase Tata Kelola Kepegawaian Sesuai Manajemen ASN	95,81 Persen	98	4.401.692.677	96	920.812.902	96	1.032.894.192	96,76	809.908.113	92,18	574.369.098	101	88	96	56	96,76	1.384.277.211	98,73	31,45							
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	23,32 Persen	62	14.052.877.898	34,15	3.091.387.098	34,15	3.450.525.808	28,4	336.713.478	31,23	294.238.759	83	11	91	9	28,40	630.952.237	46,02	4,49							
Rata-rata capaian kinerja													106	88	107	73												94	38
Predikat Kinerja													ST	T	ST	S												ST	SR
* Faktor Pendorong :																													
* Faktor Penghambat :																													
3	Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan		Persentase Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan	58,33 Persen	81,67		76,67	132.224.064.016	78,33	133.962.375.982	100	117.307.540.158	100	116.652.624.793	130		128	87	100		122								
3.1	Meningkatnya Pemenuhan Infrastruktur Dasar		Tingkat Capaian SPM Layanan Dasar Sanitasi, Air Minum dan Perumahan	69 Persen	83,33	60.498.002.402	73,33	14.343.685.000	76,67	14.752.645.550	84,88	25.848.783.950	95,81	22.851.842.820	116	180	125	155	50,0	48.700.626.770	60	80							
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Cakupan Akses Air Minum	86,7 Persen	91	22.802.628.852	88	5.373.288.000	89	5.519.486.640	89,65	6.293.583.600	91,6	12.108.383.650	101,9	117	103	219	89,65	18.401.967.250	98,52	80,70							
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Cakupan Akses Sanitasi Layak	87,13 Persen	91	21.317.584.800	88	5.025.397.000	89	5.161.158.910	91	5.008.187.500	100,0	6.986.986.450	103	100	112	135	91,00	11.995.173.950	100,00	56,27							
		Program Pengembangan Pemukiman	Jumlah Rumah Korban Bencana yang Dilengkapi	14 Unit	96	3.140.000.000	24	740.000.000	24	800.000.000	5	398.530.600	4,0	329.927.000	21	54	17	41	5,00	728.457.600	5,21	23,20							
		Program Kawasan Permukiman yang Ditangani	Luas Permukiman Kumuh yang Ditangani	90,39 Hektar	73	7.217.788.750	20	1.585.000.000	20	1.872.000.000	0,0412	1.419.375.000	-	420.748.500	0	90	-	22	0,0412	1.840.123.500	0,06	25,49							
		Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Kawasan Kumuh	9,26 Persen	8,11	6.020.000.000	8,95	1.620.000.000	8,63	1.400.000.000	3,32	12.729.107.250	3,32	3.005.797.220	163	786	162	215	3,32	15.734.904.470	40,94	261,38							
3.2	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Sesuai dengan Arahan Pola Ruang dan Struktur Ruang		Persentase Jalan dalam kondisi Mantap	57,54 Persen	66	337.986.128.313	60,19	83.091.521.016	63	83.466.312.032	58,37	57.711.669.407	61,16	66.959.929.295	97	69	97	80	58,37	124.671.598.702	88,60	36,89							
		Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Jalan dalam kondisi Baik	51,19 Persen	59,99	324.686.608.813	53,57	80.409.257.016	56,02	80.501.198.032	54,39	56.420.837.300	50,92	65.138.740.475	102	70	91	81	54,39	121.559.577.775	90,67	37,44							
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Tenaga Operator/ Teknisi/ Analisis yang Memiliki Sertifikasi	3,33 Persen	7,77	1.491.963.500	4,44	350.000.000	5,55	360.850.000	3,84	76.880.855	4,1	-	86	22	74	-	3,84	76.880.855	49,42	5,15							
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Indeks Kelancaran Lalu Lintas	0,59 Persen	0,51	11.807.556.000	0,55	2.332.264.000	0,53	2.604.264.000	0,58	1.213.951.252	0,53	1.821.188.820	95	52	100	70	0,58	3.035.140.072	113,73	25,71							

No	Tujuan / Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian pada awal perencanaan	Target pada akhir tahun perencanaan	Target RPK Tahun ke-				Realisasi RPK Tahun ke-				Tingkat capaian RPK Tahun ke-				Capaian pada akhir tahun perencanaan		Rasio capaian akhir		
						I		II		I		II		I		II		13 = 8+9+10+11			14 = 13/6*100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			Persentase Kesesuaian Usulan Pemanfaatan Ruang dengan Rekomendasi yang Dikeluarkan	97,90 Persen	100	88.437.838.643	98	21.008.358.000	98,5	20.747.368.400	100	21.389.333.061	100,0	13.380.003.869	102	102	102	64	100,00	34.769.336.930	100,00	39,32
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Adanya Kesesuaian Dokumen Pelaksanaan dengan Perencanaan Penataan Ruang	Sesuai	Sesuai	2.865.380.500	Sesuai	660.500.000	Sesuai	706.550.000	Sesuai	442.999.210	Sesuai	373.100.110	100	67	100	53	Sesuai	816.099.320	100,00	28,48
		Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Bangunan yang Terbangun	30 Persen	37	59.634.987.793	31,67	14.306.508.000	33,33	14.281.833.400	33,33	18.002.737.031	35,0	12.185.104.279	105	126	105	85	33,33	30.187.841.310	90,89	50,62
		Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase Gedung dan Lingkungannya yang Terpelihara	0 Persen	13	12.310.640.350	5	2.876.350.000	7,5	2.513.985.000	15	1.424.067.000	-	-	300	50	-	-	15,00	1.424.067.000	120,00	11,57
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Kawasan Perumahan dengan Kondisi yang Baik	33,33 Persen	33	2.955.000.000	33,33	705.000.000	33,33	750.000.000	50	259.381.000	50,0	149.562.000	150	37	150	20	50,00	408.943.000	150,02	13,84
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Saluran Drainase Perkotaan dalam Kondisi Baik	71,30 Persen	73	4.362.550.000	71,87	1.050.000.000	72,1	1.085.000.000	66,64	547.561.500	67,1	413.306.250	93	52	93	38	66,64	960.867.750	91,85	22,03
		Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Persentase Pengadaan Tanah yang Dikoordinasikan	100 Persen	100	440.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	14.949.790	100,0	14.909.540	100	15	100	15	100,00	29.859.330	100,00	6,79
		Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Jumlah Kasus Sengketa Tanah Garapan yang Tertangani	0 kasus	4	640.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	39.958.100	1,0	10.999.460	100	27	100	7	1,00	50.957.560	25,00	7,96
		Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Persentase Tanah Terlantar dan Absentee yang Diredistribusi	35,65 Persen	100	787.040.000	51,74	180.000.000	67,82	180.000.000	51,74	39.898.450	-	38.229.540	100	22	-	21	51,74	78.127.990	51,74	9,93
		Program Penatagunaan Tanah	Persentase Kawasan yang Sesuai dengan Sasaran Kawasan	0 Persen	100	246.400.000	25	50.000.000	50	50.000.000	25	29.889.750	-	-	100	60	-	-	25,00	29.889.750	25,00	12,13
		Program Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah	Persentase Tanah yang Bersertifikat	28,30 Persen	50	3.142.400.000	37,13	700.000.000	41,54	700.000.000	22,48	497.999.805	32,43	114.798.150	61	71	78	16	22,48	612.797.955	44,93	19,50
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Pertanahan	Adanya Aplikasi Sistem Informasi Pertanahan	Tidak ada	Ada	689.200.000	Ada	150.000.000	Ada	150.000.000	Ada	49.936.600	Ada	39.999.540	100	33	100	27	Ada	89.936.140	100,00	13,05
		Program Penanganan Konflik, Sengketa dan Perkara Pertanahan	Persentase Kasus Konflik dan Sengketa yang Ditangani	20 Persen	100	364.240.000	40	80.000.000	60	80.000.000	100	39.954.825	100,0	39.995.000	250	50	167	50	100,00	79.949.825	100,00	21,95
3.3	Terwujudnya Pengembangan Sistem Pembangunan Ekologis yang berorientasi pada Peningkatan Kualitas dan Daya Dukung Lingkungan		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	69,39 Persen	73	41.297.380.500	72,05	9.460.500.000	72,43	10.216.550.000	73,47	9.271.049.306	72,69	10.860.038.170	102	98	100	106	73,47	20.131.087.476	100,64	48,75
		Program Pengendalian Pencemaran dan / atau Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	62 Persen	63,56	1.365.379.600	63,28	295.600.000	63,36	325.160.000	67,5	101.170.000	64,0	175.823.160	107	34	101	54	67,50	276.993.160	106,20	20,29
		Program Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (KAKAH)	Persentase RTH yang Ditangani	12,12 Persen	12,12	1.171.270.000	12,12	220.000.000	12,12	307.000.000	5	99.988.600	4,8	102.287.500	41	45	40	33	5,00	202.276.100	41,25	17,27
		Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Ketaatan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	0 Persen	25	232.050.000	25	50.000.000	25	55.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Tidak Sesuai	Persentase MHA yang Dibina	6,67 Persen	48	139.230.000	9	30.000.000	13	33.000.000	5,33	16.493.725	5,3	13.423.740	59	55	41	41	5,33	29.917.465	11,10	21,49
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	Jumlah Gampong Iklim	2 Gampong	10	1.336.035.500	4	315.500.000	6	327.050.000	5	212.270.960	26,0	52.531.640	125	67	433	16	5,00	264.802.600	50,00	19,82
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Kasus Lingkungan Hidup yang Tertangani	100 Persen	100	255.255.000	100	55.000.000	100	60.500.000	-	-	-	1.500.110	-	-	-	2	-	1.500.110	-	0,59
		Program Pengelolaan Sampah yang Tertangani	Persentase Timbulan Sampah yang Tertangani	45 Persen	65	36.398.160.400	50	8.244.400.000	55	8.958.840.000	35,5	8.593.141.096	50,0	10.314.403.195	71	104	91	115	35,50	18.907.544.291	54,62	51,95
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Tersedianya Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	-	Ada	400.000.000	Ada	250.000.000	Ada	150.000.000	Ada	247.984.925	Ada	200.068.825	100	99	100	133	Ada	448.053.750	100,00	112,01
3.4	Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Penurunan Resiko Bencana		Indeks Resiko Bencana	168 Indeks	160	17.800.245.000	166	4.320.000.000	164	4.779.500.000	163,37	3.086.704.434	155,9	2.600.810.639	102	71	105	54	163,37	5.687.515.073	102,11	31,95
		Program Penanggulangan Bencana	Persentase Bencana yang Tertangani	100 Persen	100	6.305.000.000	100	1.855.000.000	100	1.640.000.000	100	1.261.843.556	100,0	932.940.570	100	68	100	57	100,00	2.194.784.126	100,00	34,81

No	Tujuan / Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian pada awal perencanaan	Target RPK Tahun ke-				Realisasi RPK Tahun ke-				Tingkat capaian RPK Tahun ke-				Capaian pada akhir tahun perencanaan		Rasio capaian akhir												
					I		II		I		II		I		II		13 = 8*9+10*11	14 = 13/6*100													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20												
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Layanan Pencegahan, Penyelamatan dan Pengendalian Kebakaran	92,8 Persen	96	9.430.000.000	94	2.020.000.000	95	2.650.000.000	100	1.455.795.328	100,0	1.628.870.069	106	72	105	61	100,00	3.084.665.397	104,17	32,71									
		Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana yang Ditangani	100 Persen	100	2.065.245.000	100	445.000.000	100	489.500.000	100	369.065.550	100,0	39.000.000	100	83	100	8	100,00	408.065.550	100,00	19,76									
Rata-rata capaian Kinerja														99,7	84,7	92	59													74	36
Predikat Kinerja														ST	T	ST	R													S	SR
* Faktor Pendorong :																															
* Faktor Penghambat :																															
4	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi		Pertumbuhan Ekonomi	4,13 Persen	5,2		4,5		4,8		4,38		4,52	97	#DIV/0!	94	#DIV/0!	4,38		99											
4.1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi di Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan		Persentase Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB	33,62 Persen	33,97	213.642.427.940	33,85	51.363.057.000	33,89	53.186.808.710	33,72	111.691.261.342	32,88	33.266.562.352	100	217	97	63	33,72	88.241.739.711	99	41									
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Rata-rata Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Pajale) dan Tanaman Perkebunan (Kelapa, Karet dan Kakao)	3,26 Persen	12,00	10.239.000.000	3,00	4.385.000.000	3,00	3.875.000.000	-1,42	166.456.480	2,5	4.840.331.450	(47)	3,80	84	125	(1,42)	5.006.787.930	(11,83)	48,90									
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Rata-rata Peningkatan Populasi Ternak Pertanian	3 Persen	12,00	6.865.187.500	3,00	1.700.000.000	3,00	3.875.000.000	-8,66	166.456.480	5,95	575.985.855	(289)	10	198	15	(8,66)	742.442.335	(72,17)	10,81									
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah PDRB Sektor Pertanian	3,1 Triliun Rupiah	3,50	38.100.000.000	3,10	9.900.000.000	3,30	9.150.000.000	3,4	22.331.173.295	3,4	8.764.748.000	110	226	103	96	3,40	31.095.921.295	97,14	81,62									
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Peningkatan Produksi HPT	10 Persen	10,00	43.450.000.000	2,00	11.025.000.000	2,50	9.150.000.000	2,28	22.331.173.295	2,5	114.999.480	114	203	100	1	2,28	22.446.172.775	22,80	51,66									
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana	Persentase Penanggulangan Luas Serangan OPT dan DPI	100 Persen	100,00	1.200.000.000	100	300.000.000	100,00	300.000.000	100	99.517.675	-	-	100	33	-	-	100,00	99.517.675	100,00	8,29									
		Program Penyuluhan Pertanian	Cakupan Bina Kelompok Tani	83,98 Persen	91,00	17.948.000.000	85	4.288.000.000	87,00	4.350.000.000	65,37	758.117.260	100,0	629.295.820	77	18	115	14	65,37	1.387.413.080	71,84	7,73									
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	12.983 Ton	57,000	7.145.566.250	13.500	1.595.000.000	14.000,00	1.736.500.000	13.150,14	356.796.550	14.049,91	226.596.380	97	22	100	13	13.150,14	583.392.930	23,07	8,16									
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	13.074 Ton	15.500	11.943.156.250	14.000	2.165.000.000	14.500,00	2.712.500.000	14.027,60	4.580.827.012	14.471,2	3.569.022.510	100	212	100	132	14.027,60	8.149.849.522	90,50	68,24									
		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Persentase Pengendalian dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	0 Persen	75,00	400.000.000	60	100.000.000	65,00	100.000.000	62	20.112.925	60,0	64.829.257	103	20	92	65	62,00	84.942.182	82,67	21,24									
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	25,02 Persen	30,95	74.055.517.940	26,17	15.425.057.000	27,76	17.387.808.710	19,03	3.664.469.850	19,5	12.978.254.155	73	24	70	75	19,03	16.642.724.005	61,49	22,47									
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat	Persentase Kasus Penyakit Hewan yang Tertangani	100 Persen	100,00	2.296.000.000	100	480.000.000	100,00	550.000.000	100	500.076.537	100,0	1.502.499.445	100	104	100	273	100,00	2.002.575.982	100,00	87,22									
4.2	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan dan Industri		Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB	21,56 Persen	22,55	11.065.019.000	21,95	2.875.000.000	22,15	3.836.961.864	22,73	2.317.775.354	23,46	1.367.328.641	104	81	106	36	23	2.805.838.405	100,80	25,36									
		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi yang Aktif	72,16 Persen	76,36	460.000.000	70	100.000.000	75,47	100.000.000	73,11	39.999.595	35,29	49.364.960	104	40	47	49	73,11	89.364.555	95,74	19,43									
		Program Pendidikan dan latihan Perkoperasian	Persentase Pengurus Koperasi yang Mendapatkan Pelatihan Koperasi	64,13 Persen	95,24	700.000.000	66,67	175.000.000	70,00	175.000.000	59,09	434.758.600	25,8	253.542.900	89	248	37	145	59,09	688.301.500	62,04	98,33									
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Jumlah UMKM yang Diberdayakan	0,8 Persen	2,00	650.000.000	0,5	150.000.000	0,50	200.000.000	0,62	49.673.990	0,5	-	124	33	100	-	0,62	49.673.990	31,00	7,64									
		Program Pengembangan UMKM	Persentase Jumlah UMKM yang Naik Kelas	0,02 Persen	0,05	2.730.019.000	0,03	700.000.000	0,03	550.000.000	-	189.252.243	-	143.595.191	-	27	-	26	-	332.847.434	-	12,19									
		Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Jumlah KSP/USP yang Sosialisasi	5,66 Persen	100,00	260.000.000	33,96	60.000.000	52,83	60.000.000	6,54	29.999.525	-	-	19	50	-	-	6,54	29.999.525	6,54	11,54									
		Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi yang Mendapatkan Pengawasan	17,39 Persen	20,95	315.000.000	17,95	75.000.000	20,00	75.000.000	3,79	-	-	-	21	-	-	-	3,79	-	-	18,08									
		Program Penilaian Kesehatan KSP/ISP Koperasi	Persentase Koperasi yang Dinilai	13,59	17,62	195.000.000	15,38	45.000.000	16,00	45.000.000	18,69	-	-	-	122	-	-	-	18,69	-	-	106,08									
		Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Produk Unggulan Daerah yang Dipromosikan	11,11 Persen	100,00	230.000.000	33,33	45.000.000	55,55	45.000.000	22,22	-	-	-	67	-	-	-	22,22	-	-	22,22									

No	Tujuan / Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian pada awal perencanaan	Target pada akhir tahun perencanaan		Target RPK Tahun ke-				Realisasi RPK Tahun ke-				Tingkat capaian RPK Tahun ke-				Capaian pada akhir tahun perencanaan		Rasio capaian akhir	
					6	7	8	9	10	11	12	13 = 8*9+10*11	14 = 13/6*100									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Peningkatan Perusahaan Memiliki Perizinan dan Pendaftaran	0 Persen	21,05	295.000.000	5,26	55.000.000	5,26	55.000.000	93,7	49.189.809			1,781	89	-	-	93,70	49.189.809	445,13	16,67
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pengelolaan Sarana Perdagangan yang Berfungsi	71,79 Persen	87,80	5.230.000.000	75,6	1.470.000.000	82,93	1.340.000.000	84,62	1.524.901.592	95,0	41.560.000	112	104	115	3	84,62	1.566.461.592	96,38	29,96
			Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	0,71 Persen	1,46	2.258.942.796	1,01	612.000.000	1,16	595.980.932	1,39	163.930.590	1,35	439.632.795	138	27	116	74	1,39	603.563.385	95,21	26,72
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase Pelaku Industri yang Difasilitasi	7,57 Persen	19,98	1.035.942.796	12,9	350.000.000	15,17	316.980.932	0,032	103.983.877	0,1	49.770.885	0	30	1	16	0,03	153.754.762	0,16	14,84
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Tersedianya Data Industri dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SINAS)	Tidak Ada	Ada	565.000.000	Ada	105.000.000	Ada	115.000.000	Ada	59.946.713	-	-	100	57	-	-	Ada	59.946.713	100,00	10,61
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Produksi Ikan Olahan	153 Ton	1.500	658.000.000	300	157.000.000	350	164.000.000	1.525,00		276,46	389.861.910	508		79	238	1.525,00	389.861.910	101,67	59,25
4.3	Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	8,77 Persen	10	6.712.000.000	9,49	1.678.000.000	9,83	1.678.000.000	10,041	1.331.565.046	9,47	1.630.139.714	106	79	96	97	10,041	2.961.704.760	95,90	44,13
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi PAD	101,74 Persen	100	6.712.000.000	100	1.678.000.000	100	1.678.000.000	117,52	1.331.565.046	98,93	1.630.139.714	118	79	99	97	117,52	2.961.704.760	117,52	44,13
4.4	Mengembangkan Potensi Pariwisata Daerah	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah Destinasi Wisata dalam Kondisi Baik	59 Destinasi	80	5.048.380.000	63	1.111.000.000	70	1.235.550.000	63	534.886.730	65	1.053.779.450	100	48	93	85	63,00	1.588.666.180	78,75	31,47
		Program Pemasaran Pariwisata	Cakupan Peningkatan Promosi Wisata	35,59 Persen	58	603.330.000	49,21	130.000.000	51	143.000.000	20,63	149.554.810	50,79	90.263.000	42	115	99	63	20,63	239.817.810	35,88	39,75
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Mendapatkan Pembinaan	21 Persen	69	1.299.480.000	40	280.000.000	50	308.000.000	40,00	49.999.920	100	54.909.000	100	18	200	18	40,00	104.908.920	57,97	8,07
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Cagar Budaya	Persentase Pelestarian dan Pengembangan Peninggalan Budaya yang Tertangani	13,10 Persen	22	522.562.500	17,86	105.000.000	20	150.250.000	20,00	55.000.000	22,46	418.738.800	112	52	111	279	20,00	473.738.800	89,05	90,66
		Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase Museum yang Dikelola	100 Persen	100	543.075.000	100	126.000.000	100	132.300.000	-	-	100	263.748.950	-	-	100	199	-	263.748.950	-	48,57
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Lokasi Taman Makam Pahlawan yang Terkaji	-	100	324.870.000	100	70.000.000	100	77.000.000	100,00	9.910.800	100	39.000.000	100	14	100	51	100,00	48.910.800	100,00	15,06
4.5	Meningkatnya Kemandirian Desa	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang Aktif di Kecamatan	83,26 Persen	97	1.946.500.000	92,29	425.000.000	95,24	467.500.000	60,85	525.570.955	88,83	402.632.818	66	124	93	86	60,85	928.203.773	62,93	47,69
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase Desa yang Menerapkan Perencanaan dan Pelaporan yang Berbasis Elektronik	100 Persen	100	4.410.500.000	100	975.000.000	100	1.064.500.000	100	910.745.210	100	1.036.680.259	100	93	100	97	100,00	1.947.425.469	100,00	44,15
		Program Penataan Desa	Adanya Fasilitas Permasalahan Gampong dan Kelurahan	Ada	Ada	6.117.548.073	Ada	1.318.153.000	Ada	1.449.968.300	Ada	1.774.179.995	-	-	100	135	-	-	Ada	1.774.179.995	100,00	29,00
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Memiliki Administrasi Pemerintahan yang Baik	85 Persen	90	1.293.037.500	86	300.000.000	87	315.000.000	85,00	429.012.620	85,39	324.096.800	99	143	98	103	85,00	753.109.420	94,44	58,24
4.6	Meningkatnya Nilai Investasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Kebijakan Iklim Penanaman Modal	Tidak Ada	Ada	410.000.000	Ada	85.000.000	Ada	95.000.000	Ada	78.825.225	Ada	59.907.700	100	93	100	63	Ada	138.732.925	100,00	33,84
		Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Penambahan Pelaku Investasi	10 Pelaku Investasi	40	398.927.119	10	50.000.000	10	128.927.119	1,00	36.925.500	-	21.861.450	10	74	-	17	1,00	58.786.950	2,50	14,74
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin	1.371 Pelaku Usaha	2.200	1.770.000.000	1.500	350.000.000	1.700	480.000.000	4782	168.294.997	5.127	183.602.444	319	48	302	38	4.782,00	351.897.441	217,36	19,88
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan yang Menyampaikan LKPM	60 Perusahaan	110	1.790.000.000	80	410.000.000	90	430.000.000	206	432.583.820	591	582.437.450	258	106	657	135	206,00	1.015.021.270	187,27	56,71
		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Tersedianya Pengolahan Data Penanaman Modal Secara Elektronik	Ada	Ada	785.000.000	Ada	185.000.000	Ada	200.000.000	Ada	173.899.830	Ada	48.787.650	100	94	100	24	Ada	222.687.480	100,00	28,37
4.7	Menjaga Stabilitas Tingkat Inflasi	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Dasar	Terkendalinya Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Dasar	1,97 Persen	1-3	10.005.673.864	1-3	2.239.691.632	1-3	2.395.160.795	1,56	1.124.387.055	2,79	2.034.422.325	100	50	100	85	2,79	3.158.809.380	100,00	31,57
		Program Standardisasi dan Redundansi Konsumen	Persentase UTPP yang Telah Ditara	44,36 Persen	65	636.500.000	50	135.000.000	55	150.000.000	50	118.427.710	78	96.879.850	100	88	143	65	50,00	215.307.560	77,09	33,83
		Program Perekonomian dan Pembangunan	Rata-rata Capaian Kinerja Perekonomian dan Pembangunan	96,79 Persen	99	6.519.173.864	97	1.404.691.632	98	1.545.160.795	100,00	342.745.460	99	907.543.201	103	24	102	59	100,00	1.250.288.661	101,52	19,18
Rata-rata capaian kinerja													140	73	82	67			83	33		

No	Tujuan / Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian pada awal perencanaan	Target pada akhir tahun perencanaan	Target RPK Tahun ke-		Realisasi RPK Tahun ke-				Tingkat capaian RPK Tahun ke-				Capaian pada akhir tahun perencanaan	Rasio capaian akhir					
						I	II	I	II	I	II	I	II	13 = 8*9+10*11	14 = 13/6*100							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
													Predikat Kinerja		ST	S	T	S	T	SR		
* Faktor Pendorong : * Faktor Penghambat :																						
5	Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing		Indeks Pembangunan Manusia	72,33 Indeks	73,90		72,70	164.803.637.082	73,1	142.470.871.749	74,56	141.459.243.351	75,39	210.429.708.501	103	86	103	148	74,56	355.531.871.999	79,8	
5.1	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan bagi Masyarakat		Rata-Rata lama Sekolah	9,29 Tahun	9,34	430.604.905.754	9,31	106.874.875.863	9,32	107.052.759.855	9,32	96.810.038.102	9,59	129.996.609.360	100	91	103	121	9,32	226.806.647.462	99,79	53
		Program Pengelolaan Pendidikan	APM Pendidikan Dasar 9 Tahun	83,06 Persen	93,48	425.581.705.754	85,55	105.598.625.863	88,11	105.861.509.855	101,7	96.076.766.702	90,56	117.265.662.326	119	91	103	111	101,70	213.342.429.028	108,79	50,13
		Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Sekolah yang Menerapkan Muatan Lokal	100 Persen	100,00	210.000.000	100	105.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Jumlah Guru yang Berkemampuan	54,12 Persen	72,46	3.885.000.000	68,28	971.250.000	69,64	971.250.000	70	109.967.100	50,75	656.909.100	103	11	73	68	70,00	766.876.200	96,61	19,74
		Program Pembinaan Penunjang	Jumlah Penguji	4.819 Orang	10.173	928.200.000	7.173	200.000.000	8.173,00	220.000.000	4.830	623.304.300	19.441	12.074.037.934	67	312	238	5.488	4.830,00	12.697.342.234	47,48	1.367,95
			Harapan Lama Sekolah	14,84 Tahun	15,22	832.840.480	15,04	194.189.446	15,10	203.616.562	14,87	194.177.000	14,88	78.557.840	99	100	99	39	14,87	272.734.840	97,70	32,75
		Program Penyelenggaraan Majelis Pendidikan Aceh	Persentase Sekolah yang Menerapkan Pendidikan Berkearifan	48,24 Persen	100,00	832.840.480	67,62	194.189.446	77,87	203.616.562	30	194.177.000	30,84	78.557.840	44	100	40	39	30,00	272.734.840	30,00	32,75
5.2	Meningkatnya Mutu dan Akses Layanan Kesehatan bagi Masyarakat		Angka harapan hidup	71,26 Tahun	73,54	152.113.548.823	71,92	34.259.913.412	72,46	10.657.075.751	73,66	23.367.361.238	73,82	66.015.226.747	102	68	102	619	73,66	89.382.587.985	100,16	58,76
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	16,67 Persen	50	1.577.940.000	25	340.000.000	33,33	2.474.000.000	0,0	1.663.766.025	16,67	51.577.087.471	-	489	50	2.085	-	53.240.853.496	-	3.374,07
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	100 Persen	100	72.939.178.765	100	16.416.869.686	100	2.474.000.000	0	16.416.869.686	99	8.189.684.946	-	100	99	331	-	24.606.554.632	-	33,74
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Puskesmas dengan Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	90 Persen	100	1.577.940.000	100	340.000.000	100	2.474.000.000	100	1.663.766.025	100	1.406.957.630	100	489	100	57	100,00	3.070.723.655	100,00	194,60
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Pemerataan SDM dan Kompetensi serta Kualifikasi Sumber Daya Kesehatan	98,39 Persen	100	72.939.178.765	100	16.416.869.686	100	2.474.000.000	100	2.213.000.000	89,84	4.535.000.000	100	13	90	183	100,00	6.748.000.000	100,00	9,25
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Sarana Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman yang Mendapatkan Izin	422 Unit	469	1.295.870.000	430	303.240.000	442	314.240.000	469	241.827.645	430	256.576.700	109	80	97	82	469,00	498.404.345	100,00	38,46
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Jumlah UKBM yang Aktif	970 UKBM	1.238	1.783.441.293	1.069	442.934.040	1.123	446.835.751	1.749	1.168.131.857	1.069	49.920.000	164	264	95	11	1.749,00	1.218.051.857	141,28	68,30
5.3	Meningkatnya Kualitas Kepemudaan dan Olah Raga		Persentase Pemuda Berprestasi	0,26 Persen	1,2	3.934.456.032	0,66	950.000.000	0,86	990.000.000	0,1	1.054.975.250	0,8	348.700.000	15	111	93	35	0,10	1.403.675.250	8,33	35,68
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Organisasi Pemuda yang Dibina	19,23 Persen	40	2.458.056.032	10	600.000.000	10	630.000.000	11,54	854.975.250	7,69	248.700.000	115	142	77	39	11,54	1.103.675.250	28,85	44,90
		Program Pengembangan Kapasitas Kepemudaan	Persentase Kepemudaan Aktif	100 Persen	100	1.476.400.000	100	350.000.000	100	360.000.000	100	200.000.000	100	100.000.000	100	57	100	28	100,00	300.000.000	100,00	20,32
			Indeks Pembangunan Olah Raga	0,287 Indeks	0,501	37.495.672.334	0,385	11.327.046.161	0,427	11.327.046.161	0,239	9.287.839.250	0,345	-	62	82	81	-	0,24	12.930.759.397	47,70	34,49
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Jumlah Cabang Olah Raga yang Dibina	34 Cabor	40	37.495.672.334	36	11.327.046.161	37	8.268.398.469	38	9.287.839.250	37	3.642.920.147	106	82	100	44	38,00	12.930.759.397	95,00	34,49
5.4	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Indeks Pemberdayaan Gender	58,06	58,42	44.746.108.221	58,20	9.687.612.200	58,27	10.596.373.420	59,19	10.325.318.610	62,34	13.086.145.252	102	107	107	123	59,19	23.411.463.862	101,32	52,32
		Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Organisasi Wanita yang Aktif	65 Persen	84	1.062.175.000	73	275.000.000	76	242.500.000	88	36.270.155	91,11	56.527.460	121	13	120	23	88,00	92.797.615	104,76	8,74
		Program Perlindungan Perempuan	Persentase Kasus Kekerasan Perempuan yang Tertangani	100 Persen	100	1.301.776.300	100	204.014.800	100	331.650.000	100	166.064.400	100	314.266.590	100	81	100	95	100,00	480.330.990	100,00	36,90
		Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Kasus Kekerasan Anak yang Tertangani	100 Persen	100	1.500.761.165	100	399.850.200	100	332.601.500	100	121.747.500	100	85.040.000	100	30	100	26	100,00	206.787.500	100,00	13,78
		Program Pengendalian Penduduk	Adanya Ketersediaan Sistem Informasi Keluarga Penyuluhan, Advokasi	Ada	Ada	1.207.356.150	Ada	260.150.000	Ada	286.165.000	Ada	501.094.225	Ada	527.480.021	100	193	100	184	Ada	1.028.574.246	100,00	85,19
		Program Pembinaan Keluarga Berencana	Persentase Aseptor KB	61,89 Persen	78	20.986.867.466	66	4.522.057.200	70	4.974.262.920	51,54	5.312.442.330	56,33	7.297.304.941	78	117	80	147	51,54	12.609.747.271	66,08	60,08
		Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KKS)	Persentase Desa yang Memiliki Kelompok Trbina (KST)	6,07 Persen	13	18.687.172.140	8	4.026.540.000	9	4.429.194.000	8,54	4.187.700.000	8,96	4.805.526.240	107	104	100	108	8,54	8.993.226.240	65,69	48,13

No	Tujuan / Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian pada awal perencanaan	Target RPK Tahun ke-				Realisasi RPK Tahun ke-				Tingkat capaian RPK Tahun ke-				Capaian pada akhir tahun perencanaan		Rasio capaian akhir			
					I		II		I		II		I		II		13 = 8*9+10*11	14 = 13/6*100				
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13	14		
			Kabupaten Layak Anak	Pratama	Utama	3.898.440.000	Madya	840.000.000	Nindya	924.000.000	Pratama	262.043.585	Pratama	379.698.662	50	31	33	41	Pratama	641.742.247	50,00	16,46
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Desa yang Dibina RAKM	2,79 Persen	11,17	3.341.520.000	2,79	720.000.000	2,79	792.000.000	2,79	227.339.380	2,79	188.665.540	100	32	100	24	2,79	416.004.920	24,98	12,45
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Gampong Layak Anak	31 Persen	50	556.920.000	45	120.000.000	47	132.000.000	49,59	34.704.205	49,58	191.033.122	110	29	105	145	49,59	225.737.327	99,18	40,53
5.5	Meningkatnya Daya Saing Daerah		Indeks Daya Saing Daerah	3,05 Indeks	3,20	2.930.000.000	3,10	670.000.000	3,15	720.000.000	3,15	157.490.316	3,51	524.770.640	102	24	111	73	3,15	682.260.956	98,44	23,29
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase SKPK yang Melaksanakan Penelitian dan Pengembangan	98 Persen	100	2.930.000.000	100	670.000.000	100	720.000.000	100	157.490.316	100,0	524.770.640	100	24	100	73	100,00	682.260.956	100,00	23,29
Rata-rata capaian kinerja															86	115	93	346			74	196
Predikat Kinerja															T	ST	ST	ST			S	ST
* Faktor Pendorong :																						
* Faktor Penghambat :																						
6	Menurunkan Kesenjangan Pendapatan dan Kemiskinan		Indeks Gini	0,296 Indeks	0,281	92.252.306.113	0,290	22.309.430.779	0,287	22.454.623.569	0,258	20.009.368.858	0,258	13.769.571.051.000	111	90	110	61	0,258		91,81	
6.1	Mengurangi Angka Kemiskinan		Persentase Penduduk Miskin	13,25 Persen	10,75	58.235.737.663	12,25	14.097.010.779	11,75	14.238.461.569	12,12	14.585.836.164	12,1	11.972.639.970	101	103	97	84	12,12	26.558.476.134	113	46
		Program Baitul Mal Kabupaten Bireuen	Jumlah Mustahik	6.262 Orang	33.216	42.208.630.790	8.304	10.409.143.755	8.304	10.510.594.545	9.072	10.612.069.572	5.814	8.353.331.545	109	102	70	79	9.072,00	18.965.401.117	27	44,93
		Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Persentase Tahapan Pencadangan Tanah Kawasan Transmigrasi	0 Persen	100	464.100.000	25	100.000.000	50	110.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase SP yang Aktif	42,85 Persen	42,85	696.150.000	42,85	150.000.000	42,85	165.000.000	42,86	74.292.000	42,86	74.733.000	100	50	100	45	42,86	149.025.000	100	21,41
		Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase KK Mandiri	37,31 Persen	60	696.150.000	41,79	150.000.000	47,76	165.000.000	37,31	24.325.000	38,81	29.892.000	89	16	81	18	37,31	54.217.000	62	7,79
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rata-rata Capaian Kinerja Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	106 Persen	100	14.170.706.873	100	3.287.867.024	100	3.287.867.024	109,39	3.875.149.592	230,19	3.514.683.425	109	118	230	107	109,39	7.389.833.017	109	52,15
6.2	Meningkatnya Perlindungan Sosial bagi Masyarakat		Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial	24 Persen	62	13.748.669.700	40	3.447.420.000	48	3.276.162.000	81,34	4.249.517.404	40,14	1.584.190.335	203	123	84	48	81,34	5.833.707.739	131	42,43
		Program Pemberdayaan Sosial Difasilitasi	Persentase PSKS yang Difasilitasi	85,71 Persen	90	3.085.200.000	87,71	700.000.000	88,71	739.000.000	87,50	497.666.685	87,50	425.535.625	100	71	99	58	87,50	923.202.310	98	29,92
		Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Ditangani	Persentase Warga Migran Korban Tindak Kekerasan yang Ditangani	100 Persen	100	205.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	37,62	2.940.000	22,27	12.509.725	38	6	22	25	37,62	15.449.725	37,62	7,54
		Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang Rehabilitasi Sosial yang Ditangani	43,02 Persen	43	3.734.834.500	43,06	780.000.000	43,08	899.950.000	49,93	903.523.670	54,22	428.548.200	116	116	126	48	49,93	1.332.071.870	116	35,67
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Masyarakat yang Diberikan Jaminan Sosial	84,65 Persen	85	6.723.635.200	84,65	1.917.420.000	84,65	1.587.212.000	63,09	2.845.387.049	61,97	717.596.785	75	148	73	45	63,09	3.562.983.834	75	52,99
6.3	Meningkatnya Ketahanan Pangan		Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	79,4 Skor	95	20.267.898.750	85,70	4.765.000.000	88,80	4.940.000.000	89,1	1.174.015.290	98,10	212.740.746	104	25	110	4	89,10	1.386.756.036	94	
		Program Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Ketersediaan Pangan Utama (Beras)	103 Persen	106	13.102.775.000	105	3.100.000.000	105	3.235.500.000	91	-	-	-	87	-	-	-	91,00	-	86	-
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase KWT Aktif	72 Persen	81	5.810.851.875	75	1.365.000.000	77	1.395.750.000	10	1.077.506.100	58,33	146.565.080	13	79	76	11	10,00	1.224.071.180	12	21,07
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Penanganan Desa yang Terindikasi Rawan Pangan	9 Persen	22	600.000.000	13	125.000.000	16	125.000.000	6,82	39.792.900	-	-	52	32	-	-	6,82	39.792.900	31	6,63
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar yang Aman Dikonsumsi di Kabupaten Bireuen	87 Persen	91	754.271.875	88	175.000.000	89	183.750.000	90	56.716.290	100,00	66.175.666	102	32	112	36	90,00	122.891.956	99	16,29
Rata-rata capaian kinerja															87	64	80	38			72	24
Predikat Kinerja															T	R	T	SR			S	SR
* Faktor Pendorong :																						
* Faktor Penghambat :																						
7	Menurunkan Angka Pengangguran		Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka	4,32 Persen	3,35		3,8	670.000.000	3,65	937.000.000	4,14	374.851.655	3,93	412.569.720	91,1	56	92	44	4,14		124	
7.1	Meningkatnya Kesempatan Kerja		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	65,91 Persen	69,63	3.771.470.000	67,73	670.000.000	68,37	937.000.000	66,96	374.851.655	67,24	412.569.720	98,86	56	98	44	66,96	787.421.375	96,17	21
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Jumlah Lulusan Pelatihan yang Memiliki Kompetensi	40,97 Persen	44	3.121.730.000	41	530.000.000	42	783.000.000	68,13	264.325.815	68,68	318.611.350	166,2	50	164	41	68,13	582.937.165	154,84	18,67
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja yang Telah Ditempatkan	60,42 Persen	65	417.690.000	62	90.000.000	63	99.000.000	30,43	70.579.640	60,98	43.971.200	49,1	78	97	44	30,43	114.550.840	46,82	27,42
		Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang Difasilitasi	12 Persen	48	232.050.000	12	50.000.000	12	55.000.000	12,14	39.946.200	12,14	49.987.170	101,2	80	101	91	12,14	89.933.370	25,29	38,76
Rata-rata capaian kinerja															104	66	115	55			76	28
Predikat Kinerja															ST	S	ST	R			T	SR
* Faktor Pendorong :																						

No	Tujuan / Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian pada awal perencanaan	Target pada akhir tahun perencanaan	Target RPK Tahun ke-		Realisasi RPK Tahun ke-		Tingkat capaian RPK Tahun ke-		Capaian pada akhir tahun perencanaan	Rasio capaian akhir									
						I	II	I	II	I	II			13 = 8*9+10*11	14 = 13/6*100							
* Faktor Penghambat :																						
8	Meningkatkan Ketertarikan, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat		Indeks Kasus Keamanan dan Ketertiban	1,72 Indeks	<1	38.137.610.408	<1	11.749.802.745	<1	17.289.155.458	1,2	3.465.675.595	60.467.388.070	-	29	-	350	1,2	-	-		
8.1	Optimalisasi Ketertarikan dan Ketertiban		Persentase Konflik yang Diselesaikan	50 Persen	72	13.199.944.768	60	3.357.829.999	65	2.773.466.064	50	2.397.739.805	70	3.941.293.106	83	71	108	142	50	6.339.032.911	69	48
		Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Peningkatan Pemahaman Terhadap Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	21	25	986.974.227	23	350.499.999	24	193.021.064	65	91.416.605	97	898.995.100	283	26	404	466	65,00	990.411.705	260	100,35
		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas yang Mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan	64 Persen	74	690.847.504	68	351.000.000	70	138.600.000	65	33.949.660	100	95.617.775	96	10	143	69	65,00	129.567.435	88	18,75
		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Fasilitasi FKUB Kabupaten	Ada	Ada	531.830.000	Ada	221.830.000	Ada	100.000.000	Ada	26.689.000	Ada	84.613.210	100	12	100	85	Ada	111.302.210	100	20,93
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Ancaman/Deteksi Dini Konflik yang Tertangani	75 Persen	87	607.975.625	80	334.500.000	82	85.250.000	68	241.855.000	80	588.561.970	85	72	98	690	68,00	830.416.970	78	136,59
		Program Peningkatan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Persentase Jumlah Kasus Pelanggaran Qanun yang Diselesaikan	100 Persen	100	10.382.317.412	100	2.100.000.000	100	2.256.595.000	89	2.003.829.540	100	2.273.505.051	89	95	100	101	89,00	4.277.334.591	89	41,20
8.2	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat dalam Berpolitik		Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum	77,91 Persen	80	24.937.665.640	-	8.391.972.746	80	14.515.689.394	-	1.067.935.790	81,27	56.526.094.964	-	13	102	389	-	57.594.030.754	-	230,95
		Program Peningkatan peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase Peserta Partai Politik yang Memahami Mekanisme Pengelolaan Partai	81,8 Persen	90	24.937.665.640	85	8.391.972.746	87	14.515.689.394	83,0	1.067.935.790	41,67	56.526.094.964	98	13	48	389	83,00	57.594.030.754	92,22	230,95
												Rata-rata capaian kinerja Predikat Kinerja		104	39	138	291			101	111	
												ST	SR	ST	ST			ST	ST			
* Faktor Pendorong :																						
* Faktor Penghambat :																						